



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI VIII DPR RI
(BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 24
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Pejabat Eselon I Kementerian Agama Republik Indonesia
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 27 September 2021
Waktu	: 10.21- 14.53 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Acara	: Evaluasi Program dan anggaran Tahun 2021; Isu-isu Aktual lainnya.
Ketua Rapat	: Wakil Ketua Komisi VIII/F- PG (Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si.)
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si. (Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR RI)
Hadir	: 41 anggota dari 50 Anggota Komisi VIII DPR RI
Anggota yang Hadir	: PIMPINAN: 1. Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily. M.Si. (F-PG) ANGGOTA: FRAKSI PDI PERJUANGAN 2. I Komang Koheri, S.E. 3. Drs. Samsu Niang, M.Pd.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

4. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag.,
S.H., M.H.

5. Muhammad Ali Ridha.

FRAKSI PARTAI GERINDRA

-

**FRAKSI PARTAI NASIONAL
DEMOKRAT**

6. H. Rudi Hartono Bangun, S.E.,
M.A.P.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA**

7. MF. Nurhuda Y.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

8. Drs. H. Achmad., M.Si.

9. Wastam, S.E., S.H.

**FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA**

10. K.H. Bukhori, Lc., M.A.

11. H. Iskan Qolba Lubis, M.A.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

12. H. Muhammad Rizal, S.H., M.Si.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN**

-

Anggota Izin

- :
1. Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik,
M.P.A. (Wakil Ketua/F-P.Gerindra)
 2. Hj. Selly Andriany Gantina, A.Md. (F-
PDIP)
 3. H. Arwan M. Aras, T., S.Kom. (F-PDIP)
 4. M. Saleh. S.E. (F-PG)
 5. Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M. (F-PG)
 6. M. Husni, S.E., M.M. (F- P. Gerindra)
 7. Dr. H. Jeffry Romdonny, S.E., S.Sos.,
M.Si., M.M. ((F- P. Gerindra)
 8. H. Hasani Bin Zuber. S.IP. (F. P.
Demokrat)
 9. KH. Bukhori., LC., M.A. (F. PKS)

Undangan

- :
- Jajaran Eselon I Kementerian Agama
Republik Indonesia
Kepala BPJPH beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

KETUA KOMISI VIII/ F- PG (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si):

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan para Anggota Komisi VIII DPR RI.
Yang terhormat para pejabat Eselon I Kementerian Agama Republik Indonesia.

Saya ingin sebut satu-persatu Pak Sekjen, Pak Sekjen Prof. Nizar, Pak Dirjen Pendidikan Islam Prof. Muhammad Ali Ramdhani, Pak Dirjen Bimas Islam Prof. Kamaruddin Amin, Pak Dirjen Bimas Kristen Prof. Thomas Pentury, Pak Dirjen Bimas Katolik Pak Yohanes, Pak Dirjen Bimas Hindu Pak Tri Handoko Seto, Pak Dirjen Bimas Buddha Pak Caliadi, Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Pak Drs. Khoirizi, Pak Inspektur Jenderal Pak Deni, Kepala Balitbang Diklat Prof. Achmad Gunaryo dan Plt. Kepala BPJPH Prof. Mastuki dan

Seluruh hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat pada hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR RI dengan para pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebelum kita lanjutkan marilah kita bersama-sama berdoa untuk kelancaran acara ini sebagaimana kebiasaan di Komisi VIII kami akan memulai dengan membaca umul kitab bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama non muslim dipersilakan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Membaca surat Al-Fatihah mulai.

BERDOA : MULAI
BERDOA : SELESAI

Terima kasih, selamat datang Syekh Marwan Dasopang.

Sesuai dengan Acara Rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021–2022 yang telah diputuskan di dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus, antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI tanggal 13 Juli dan sesuai dengan Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI tanggal 18 Agustus, maka pada hari Senin 27 September Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan tema evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2021 dan isu-isu aktual lainnya.

Hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan atas laporan dari Sekretariat yang hadir secara fisik 12 orang dan yang virtual 29 Anggota dari 9 Fraksi dan dari 8 izin, 8 anggota dari 50 Anggota Komisi VIII. Sesuai dengan tata cara rapat di masa pandemi di

lingkungan DPR RI dengan mitra yang dihadiri paling banyak 20% dari jumlah Anggota yang hadir secara fisik dan sesuai dengan Pasal 254 ayat (5) Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, bahwa dalam hal rapat dilakukan secara virtual kehadiran Anggota dapat ditetapkan sebanyak 1 Anggota untuk setiap Fraksi kecuali ditentukan oleh Pimpinan DPR. Atas persetujuan para pejabat Eselon I Kementerian Agama, serta Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, maka rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)
(RAPAT DIBUKA PUKUL: 10.21 WIB)

Acara rapat ini terdiri atas:

1. Pengantar Ketua Rapat.
2. Penjelasan masing-masing Eselon I, karena ini jumlahnya cukup banyak yaitu sebanyak 11 pejabat Eselon I maka nanti kami akan batasi per pejabat maksimal 7 menit.
3. Setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab.
4. Kesimpulan dan penutup.

Apakah rapat ini dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Selanjutnya kita akan menyepakati rapat ini kita selesaikan pukul 12.30 ya, setuju Pak Samsu Niang? Nah kalau Pak Samsu sudah oke selesai semua.

(RAPAT : SETUJU)

Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati.

Para Pejabat Eselon I kami menyampaikan terima kasih atas kehadirannya, dalam rapat evaluasi yang diselenggarakan oleh Komisi VIII DPR RI. Rapat pada hari ini diselenggarakan berdasarkan atas Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa APBN perubahan, APBN, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Mengacu kepada ketentuan Undang-Undang tersebut pada rapat hari ini tentu memiliki makna strategis yaitu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja Pemerintah tahun 2021 dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah dalam menangani permasalahan aktual mengenai bidang agama dan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

Total anggaran Kementerian Agama tahun 2021 itu sebesar Rp67.430.825.007.000,- mengalami perubahan dari pagu awal sebesar Rp66.961.386.000.822,- Pada hari ini Komisi VIII DPR RI ingin mendapatkan penjelasan dari masing-masing Direktorat tentang serapan anggaran tahun

2021 hingga saat ini. Dan yang terpenting adalah mengenai bagaimana capaian program prioritas yang direncanakan, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Ini kita sudah bulan kesembilan, menjelang bulan kesepuluh.

Selain itu Komisi VIII juga bermaksud membahas mengenai isu-isu aktual dalam pelaksanaan anggaran dan program pada Kementerian Agama Republik Indonesia, salah satu isu aktual adalah mengenai Perpres Dana Abadi Pesantren. Kita patut bersyukur tentu bahwa pada tanggal 2 September 2021 Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Perpres 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, yang di dalamnya diatur tentang Dana Abadi Pesantren sebagai amanat dari Undang-Undang yang telah disahkan oleh DPR RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Tentu Perpres ini merupakan kabar baik bagi peningkatan pengembangan pendidikan pesantren. Namun demikian perlu ada penjelasan lebih *clear* tentang bagaimana teknis dari Dana Abadi Pesantren tersebut. Dengan demikian maka Dana Abadi Pesantren tersebut mampu untuk meningkatkan kualitas pesantren diseluruh Indonesia. Nah karena itu implementasi dari Perpres tersebut tentu harus kita jabarkan terutama bagi peningkatan kualitas anggaran dan pendidikan di pesantren tersebut.

Isu aktual lainnya adalah mengenai ruang lingkup tugas dari Dirjen Bimas Islam, khususnya mengenai peningkatan peran para petugas KUA dan para penyuluh agama. Letak geografis Indonesia begitu sangat luas dan memiliki belasan ribu pulau yang mengharuskan Kementerian Agama bisa memberikan pelayanan secara maksimal dari kondisi geografis tersebut. Misalnya di Kepulauan di NTT petugas KUA harus bisa meningkatkan mobilitas dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, kemudian Dirjen Bimas Islam perlu mempertimbangkan untuk membuat program terobosan misalnya merancang kantor KUA yang dapat beroperasi secara *mobile*, sehingga petugas KUA dan penyuluh agama dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan keagamaan melalui KUA *mobile* tersebut.

Dan saya kira juga di era pandemi seperti sekarang ini, saya kira Kementerian Agama perlu menjelaskan secara lebih komprehensif tentang persiapan pembelajaran tatap muka di lingkungan pesantren dan juga di madrasah, dan juga lembaga-lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Karena kita tahu bahwa saat ini harapan publik, harapan masyarakat agar proses pembelajaran tatap muka itu bisa betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tetapi tetap dengan memprioritaskan keselamatan dan kesehatan para peserta didik. Untuk itu maka perlu ada penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana proses pembelajaran tatap muka di lingkungan Kementerian Agama dengan tetap mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan para peserta didik kita.

Dalam beberapa kasus kita menyaksikan bahwa proses pembelajaran tatap muka di beberapa sekolah ditemukan adanya cluster baru, tentu kami tidak ingin bahwa proses seperti ini ya terutama saya kira di perguruan tinggi keagamaan ya baik di Islam, Kristen, Katolik, Hindu, maupun Buddha

bagaimana proses persiapan menuju pendidikan tatap muka tersebut. Selain itu juga tentu yang seru dikeluhkan adalah soal penyuluh agama khususnya penyuluh agama non PNS yang banyak disampaikan kepada kami.

Dalam hal persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, kami juga perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Kementerian Agama terutama dari Dirjen PHU. Kami kemarin juga menerima beberapa asosiasi penyelenggaraan haji dan umroh yang hingga saat ini tentu dari aspek dunia usahanya itu betul-betul juga mengalami dampak yang tidak sedikit dan oleh karena itu tentu kami perlu ada penjelasan lebih lanjut tentang terobosan-terobosan apa yang dilakukan, karena disisi lain juga misalnya Pemerintah telah memiliki program pemulihan ekonomi. Nah dari aspek penyelenggaraan umroh ini apa koordinasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama terutama Dirjen PHU terkait dengan *survive*-nya para penyelenggara terutama ibadah umroh tersebut.

Nah berdasarkan paparan mengenai evaluasi kinerja anggaran dan isu-isu aktual tersebut, maka pada hari ini Komisi VIII ingin mendapatkan penjelasan antara lain:

1. Bagaimana realisasi dan penyerapan anggaran dari seluruh satker di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2021, apa saja target kinerja yang telah dicapai dan apa saja yang belum tercapai?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja pada masing-masing satker Kementerian Agama di tahun 2021, serta bagaimana kebijakan penyelesaian sehingga faktor terhambat tersebut dapat tidak terulang lagi di tahun 2022?
3. Apa saja kebijakan-kebijakan dari para pejabat Eselon I Kementerian Agama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di bidang agama dan pendidikan keagamaan sehingga kinerja Kementerian Agama secara umum dapat meningkat dari tahun sebelumnya?

Demikian sebagai pengantar dari rapat ini, selanjutnya kami mohon sekali lagi nanti penjelasan dari masing-masing Eselon I yang jumlahnya yang kita undang sebanyak 11 satker, ini untuk dibatasi menjadi 7 menit dari masing-masing Eselon I. Nah untuk pertama tentu kami persilakan kepada Pak Sekjen Prof. Nizar untuk terlebih dahulu, dilanjutkan nanti dengan Dirjen Pendis Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, PHU, Irjen Balitbang Diklat, dan BPJPH.

Dipersilakan kepada Pak Sekjen.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA (NIZAR ALI):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII dan para Anggota Komisi VIII yang terhormat

Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur dan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa, karena atas taufik dan hidayah-Nya kita dapat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dalam rangka evaluasi pelaksana anggaran APBN tahun 2021 dan isu-isu aktual dan seterusnya-seterusnya. Pada kesempatan yang baik ini perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang terhormat,

Yang senantiasa memberikan motivasi, perhatian, dan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga Sekretariat Jenderal dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan reformasi birokrasi di Kementerian Agama. Selanjutnya izin kami menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal tahun 2021 sebagai bahan evaluasi yaitu realisasi anggaran dan kendala dalam pelaksana anggaran tahun 2021, serta beberapa hal yang terkait dengan isu-isu aktual dan solusinya yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal.

Yang pertama evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2021. Sebagaimana kita tahu bahwa alokasi anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2021 itu sebesar 2.280.048.995.000. Seiring dengan dinamika yang terjadi pada tahun anggaran 2021 nah alokasi anggaran Sekretariat Jenderal mengalami perubahan sebesar *minus* 4,82% atau sekitar Rp109.957.249.000,-

Berikut ini tabel alokasi anggaran yang *minus* 4,82% itu ada di tabel nomor 1. Perubahan jumlah anggaran di tabel 2021 itu karena adanya kebijakan Pemerintah yakni *refocusing* dan realokasi anggaran untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 ,yang dilaksanakan antara lain untuk mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, percepatan program pemulihan ekonomi nasional, dan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat.

Nah kebijakan *refocusing* belanja tahun 2021 ini dilaksanakan dengan melakukan penghematan anggaran belanja yang terdapat pada RK/KL Sekretariat Jenderal tahun 2021, dengan kriteria-kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Surat Menteri Keuangan tentang *refocusing* dan realokasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga tahun 2021.

Realisasi anggaran 2021 berdasarkan jenis kewenangannya anggaran Sekretariat Jenderal sebesar 2.170.089.746.000 terdistribusikan 12,74% pada kantor pusat atau sebesar Rp276.427.840.000,- dan 87,28% atau Rp1.893.611.906.000,- berada di kantor daerah, provinsi, dan kabupaten/kota yakni di 35 provinsi dan 514 kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Postur dan realisasi anggaran serapan anggaran Sekretariat Jenderal berdasarkan kewenangannya di kantor pusat itu realisasinya 53,82%, di kantor daerah, provinsi dan kabupaten/kota itu 70,82%, sehingga rata-rata Sekretariat Jenderal untuk tahun ini adalah 68,66%. Sedangkan fungsi pendidikan, fungsi berdasarkan fungsi maka realisasi anggaran fungsi agama ini yang sudah terealisasi adalah 68,66%, pendidikan ini 65,56%, sehingga total 68,66%.

Tabel ini menunjukkan bahwa realisasi tertinggi terdapat pada anggaran fungsi agama yaitu sebesar 68,66% dan memang anggarannya sangat kecil yakin ada di kerukunan umat beragama dan Konghucu, sedangkan anggaran fungsi pendidikan terealisasi sebesar 65,58%. Meskipun nilai presentase fungsi agama lebih tinggi namun secara nominal anggaran yang belum terealisasi pada fungsi agama masih cukup besar yakni Rp678.618.688.620,-

Kemudian realisasi anggaran berdasarkan program, untuk program dukungan manajemen ini terealisasi 68,75%, kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama 66,38%, dan kualitas pengajaran dan pembelajaran ini 65,57%, sehingga total rata-rata adalah 66,66%. Komposisi anggaran Sekretariat Jenderal berdasarkan jenis belanja tersebut adalah pada jenis belanja pegawai sebesar 66,42%, belanja barang sebesar 26,72%, belanja modal 6,87%, dan ini bisa dilihat di tabel 5 realisasi anggaran tahun anggaran 2021 berdasarkan jenis belanja.

Untuk sumber dana realisasi hibah langsung dalam negeri itu 659 juta ini belum terealisasi, kemudian rupiah murni 68,68%. Sedangkan jenis kegiatan yang tersebar di seluruh satuan kerja kantor pusat dan kantor daerah realisasi anggaran tertinggi yang sudah terserap adalah pada pembinaan administrasi keuangan dan BMN sebesar 75,22% ini di Biro Keuangan dan BMN, dan terendah adalah pembinaan administrasi organisasi dan tata laksana sebesar 20,67%.

Tabelnya bisa dilihat di tabel VII, dimana realisasi anggaran untuk kegiatan pembinaan administrasi hukum dan KLN itu 57,43%, pembinaan administrasi informasi keagamaan dan kehumasan 52,47%, pembinaan administrasi kepegawaian 46,20%, pembinaan administrasi keuangan dan BMN 75,22%, pembinaan administrasi organisasi dan tata laksana 20,67%, pembinaan administrasi perencanaan 45,55%, pembinaan administrasi umum 63,70%, pembinaan kerukunan umat beragama 66,61% dan pembinaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Konghucu 65,56%, dan terakhir peningkatan kualitas layanan umat Konghucu 61,84%.

Bapak /Ibu Anggota Komisi VIII yang saya hormati.

Di apa tabel VIII itu menjelaskan realisasi anggaran untuk khusus Covid-19 tahun 2021 berdasarkan kegiatan, dimana dalam rangka penanganan covid Sekretariat Jenderal melakukan *refocusing* anggaran tahun 2021 untuk penyediaan anggaran penanganan Covid-19 yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perkantoran, anggaran tersebut digunakan antara lain untuk pembelian alat pelindung diri,

penguat daya tahan tubuh vitamin, pelaksanaan swab, pembelian lisensi Zoom, paket internet dan pendukung lainnya dalam rangka penanganan dan pencegahan Covid-19. Ada pun besaran anggaran untuk penanganan Covid-19 di Sekretariat Jenderal adalah sebesar Rp18.418.620.000,- ini bisa anggaran ini direalisasikan sebesar 38,04% dan itu bisa dilihat di tabel VIII.

Kendala pelaksanaan anggaran, kendala pelaksanaan anggaran secara umum adalah penyesuaian pelaksanaan program terhadap kebijakan pemberlakuan PPKM darurat. Kendala lain yaitu adanya penyesuaian kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja Sekretariat Jenderal berdasarkan arahan Menteri Keuangan yang dilakukan sebanyak empat kali yaitu dengan total anggaran Rp109.957.249.000,-

Jika melihat prokna prokna serapan anggaran Kementerian Agama tahun 2019 sampai 2021 terjadi penumpukan pencairan anggaran di bulan Desember. Dalam mengatasi hal tersebut Sekretariat Jenderal segera melakukan *early warning* pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam menghadapi akhir tahun 2021. Hal ini diharapkan dapat mengurangi potensi ketidak tertiban pelaksanaan anggaran yang akan mempengaruhi kendala laporan keuangan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Isu-isu aktual dan solusinya yang pertama seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. Untuk jabatan Pimpinan Tinggi Madya sekarang sudah tinggal menunggu SK Presiden dan sudah dilaksanakan apa tim penilai akhir tinggal menunggu SK Presiden. Untuk yang JPT Pratama sudah memasuki tahap seleksi akhir wawancara, dari 188 yang melamar kemudian yang lolos untuk wawancara ada 118, dan tanggal 18 sampai 19 September kemarin itu dilakukan penilaian makalah dan wawancara untuk JBT Pratama untuk 22 jabatan. Selanjutnya nanti kira-kira diakhir September ini atau awal Oktober paling lambat pansel akan menyampaikan tiga nama berdasarkan peringkat terbaik kepada Menteri Agama sebagai PPK dan selanjutnya akan ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terpilih setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara.

Yang kedua, adalah penerimaan calon Aparatur Sipil Negara CPNS dan CPPP, tahun ini Kementerian Agama membuka 10.820 formasi calon ASN terdiri dari 1.361 CPNS dan 9.459 calon PPPK. Hingga penutupan pendaftaran pada tanggal 26 Juli kemarin lebih dari seratus ribu pelamar mendaftarkan diri secara online pada laman yang tersedia dibuka setiap 7 hingga 26 Juli data rincian terakhir rekapitulasi panitia seleksi diperoleh 111.670 pelamar calon ASN Kementerian Agama tahun 2021. Data tersebut terdiri 10.515 pelamar calon eh 102.518 pelamar calon Pegawai Negeri Sipil dan 9.152 calon PPPK. Jumlah pelamar tahun ini memang luar biasa khususnya untuk CPNS. Tahun 2021 ini Kemenag membuka 1.361 CPNS sementara yang mendaftar 102.518 orang, sehingga perbandingan kurang lebih 1 dibanding 75.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Yang ketiga, adalah penerimaan calon PPPK guru agama pada sekolah umum atau Pemda. Data yang diusulkan untuk formasi PPPK guru agama di sekolah umum yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya pada tahun 2021 adalah berjumlah 27.303 orang secara nasional, terdiri dari guru agama Buddha 39, guru agama Hindu 403, agama Islam 22.927, guru agama Katolik 1.207 dan guru agama Kristen 2.727 orang.

Kemudian yang berikutnya adalah perbaikan tata kelola birokrasi. Perbaikan tata kelola dan layanan birokrasi sebagai salah satu semangat baru Kementerian Agama dengan terus bertambahnya satuan kerja yang berpredikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani semakin mencerminkan Kementerian Agama optimis dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Ditambah lagi Kementerian Agama telah melaksanakan proses penyederhanaan birokrasi Eselon III dan IV melalui penyederhanaan struktur organisasi dan penyederhanaan jabatan sampai tanggal 30 Juni 2021 Kementerian Agama telah menyederhanakan struktur organisasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Kantor pusat itu jabatan administrasi semula 623, setelah penyederhanaan jadi 143,
2. Infasi vertikal semula 5.275, setelah penyederhanaan 4.308,
3. 72PTKN yaitu jabatan administrasi PTKN 1.830 menjadi 521, dan terakhir
4. Unit pelaksanaan teknis lainnya semula 6.092 menjadi 56. Sehingga total dari jabatan administrasi berjumlah 13.823. akhirnya akhir menjadi 5.078 jabatan.

Kemudian untuk jabatan administrasi yang disetarakan untuk Eselon III administrasi yang diusulkan untuk disetarakan 200 yang disetujui Menpan ada 117, pengawas 1.348 yang disetujui 861, kemudian untuk Eselon V 9 semuanya disetujui, sehingga total dari 1.555 jabatan administrasi yang disetarakan yang disetujui 987.

Selanjutnya untuk penyetaraan tahap kedua di tahun 2021 adalah jabatan administrasi yang berdampak penyederhanaan struktur organisasi yaitu sebanyak 8.795 termasuk di dalamnya adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA sebanyak 5.963. Dengan telah dilaksanakan proses penyederhanaan birokrasi tersebut tantangan utama Kementerian Agama adalah menyusun organisasi dan tata kerja baru, mekanisme kerja, manajemen kinerja, manajemen resiko dan pemanfaatan teknologi, sehingga Pemerintah dinamis pada Kementerian Agama dapat terwujud dengan tiga elemen pendukung yakni *able people*, (*suara tidak jelas*) *process*, dan *adaptive policies*.

Selain itu dengan terus meningkatnya nilai reformasi birokrasi Kementerian Agama dari tahun ke tahun dapat dijadikan pertimbangan untuk diberikan persetujuan kenaikan tunjangan kinerja Kementerian Agama seiring dengan banyaknya perubahan tata kelola birokrasi yang terus membaik.

Bapak/Ibu yang saya hormati.

Demikian mungkin penjelasan yang dapat kami sampaikan dalam rapat dengar pendapat unit kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI yang terhormat. Dalam pembahasan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN tahun 2021, serta beberapa isu aktual dan solusinya. Besar harapan kami atas dukungan dan masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang terhormat.

Dalam meningkatkan kualitas tata kelola pelaksanaan program kerja kedepan yang lebih baik. Sekali lagi kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat atas perhatian dan kerja samanya dalam peningkatan kinerja Kementerian Agama. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Sekjen. Selanjutnya Pak Dirjen Pendis silakan, Pak.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA:

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi menjelang siang salam sejahtera.

Om Swastiastu Syalom
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan

Pimpinan Komisi VIII DPR RI dan para Anggota yang berbahagia,
Para teman-teman Eselon I, Eselon II dari Kementerian Agama,
Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Untuk *muqadimmah* saya ikut dengan Pak Sekjen, namun demikian perkenankan dalam kesempatan yang baik ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih pada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang tak henti-henti memberikan dukungan dan perhatian terhadap upaya peningkatan kinerja Kementerian Agama pada umumnya khususnya pada program pendidikan Islam. Selanjutnya izinkan kami untuk menyampaikan penjelasan mengenai pembahasan evaluasi program dan anggaran tahun 2021 dan isu-isu aktual.

Ibu dan Bapak yang saya hormati.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah mengalami tiga kali *refocusing* anggaran pada fungsi pendidikan, dengan total penghematan sebesar Rp948.012.572.000,- dengan demikian sampai saat ini alokasi anggaran pada program pendidikan Islam sebesar Rp54.492.247.880.000,- Untuk penganggarannya sebagaimana tersaji pada tabel I, sementara untuk realisasi anggaran program pendidikan pada tahun 2021, anggaran program pendidikan di distribusikan pada 3.481an kerja pusat dan daerah yang meliputi 34 kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, 500 kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, 58 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, dan 3.481 Madrasah Negeri. Anggaran tersebut dibagi kedalam 9 kegiatan dan realisasi berdasarkan kewenangan dapat dilihat pada tabel II, dimana ditingkat pusat penyerapan 77,92%, di PTKIN penyerapan 55,67%, sementara di Kanwil 69,27%, sehingga jumlah rata-rata realisasi anggaran berdasarkan kewenangan 68,98%.

Sementara berdasarkan kegiatan untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan agama Islam penyerapan 59,39%, pengelolaan dan pembinaan pendidikan keagamaan Islam 21,43%, pengelolaan dan pembinaan pendidikan madrasah 84,06%, kemudian peningkatan akses mutu relevansi dan daya saing pendidikan tinggi keagamaan Islam 43,60%, peningkatan kopetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan madrasah 46,87 %, dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya pada pendidikan Islam 74,55%, pendidikan mutu dan relevansi pendidikan madrasah 37,32%, selanjutnya pendidikan mutu dan relevansi pendidikan keagamaan Islam 13,22%, peningkatan akses mutu relevansi dan daya saing Ma'had Aly 87,93%.

Sementara berdasarkan jenis belanja, belanja pegawai terserap 70,26%, belanja barang 72,54%, belanja modal 40,49%, dan belanja bantuan sosial 81,01%. Untuk realisasi berdasarkan sumber dana, rupiah murni 73,98%, pinjaman luar negeri 21,24%, pinjaman murni rupiah murni pendamping 23,82%, PNBPN 34,07%, Badan Layanan Umum 31,13%, hibah dalam negeri 4,04%, dan SBSN 39,51%, dengan jumlah penyerapan seluruhnya sama dengan angka 68,96%.

Sementara itu untuk capaian kinerja pada pendidikan Islam pada tahun 2021, capaian APK dan APM pada RA, MI, ULA, kemudian MTS Usto, Madrasah Aliyah Uliyah dan PTKI, Ma'had Aly maka capaiannya bisa disajikan pada tabel bagaimana tertayang, pada dasarnya semuanya telah memenuhi kriteria target kecuali pada Radhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Madrasah Aliyah dan di PTKI.

Selanjutnya untuk rata-rata nilai ujian satuan pendidikan yang bermuatan moderasi beragama capaiannya adalah 74,62%, sedangkan untuk assessment kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi *alhamdulillah* sudah mencapai target dengan angka 116,64%. Sementara untuk presentase prodi yang terakreditasi A atau unggul jumlah targetnya adalah targetnya 281 dan capaiannya 351, sehingga capaiannya adalah 122,33%, dan untuk presentase guru ustadz bersertifikat pendidikan capaiannya adalah 96,56%, sementara untuk presentase dosen bersertifikat

pendidik dan dosen berkualifikasi S3, capaian untuk dosen berkualifikasi pendidik itu 92,67%, sementara dosen berkualifikasi S3 98,0%. Untuk capaian presentase publikasi ilmiah di jurnal internasional dan presentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan point pertama yang publikasi capaiannya adalah 110%, sementara lulusan PTK yang bekerja itu 99,83%.

Presentase prodi PTK yang memenuhi standar akreditasi nasional itu *alhamdulillah* capaiannya memperoleh angka yang sangat membanggakan yaitu 419,06%. Sementara peningkatan mahasiswa asing di PTKI targetnya adalah 55.918 sementara capaiannya hanya 5.180 karena kondisi pandemi, lintas manusia antar negara ini relatif berat pada masa pandemi ini sehingga capaian kami hanya baru mencapai 9,33%. Sedangkan untuk IPK untuk S1 capaiannya 100,37%, di S2 dari target 3,25 rata-rata masih 3,21 capaiannya 98,71 dan untuk S3 dengan target 3,5 capaiannya 3,3 dan masih diangka 94,30%. Untuk jurnal terakreditasi nasional jumlah targetnya adalah 816 dan *alhamdulillah* pada saat ini jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional dapat dicapai 874, artinya capaiannya 107,14%. Sementara untuk penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk PMPRB capaiannya adalah 91,52%, sedangkan untuk SAKIP 98,04%.

Isu-isu aktual, isu-isu aktual yang pertama adalah pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh telah menjadi pilihan proses pembelajaran ditengah pandemi Covid-19 seperti yang terjadi pada saat ini. Pola pelaksanaan pendidikan tatap muka tidak bisa dilaksanakan sementara waktu karena aturan pembatasan sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pembelajaran jarak jauh merupakan sistem pendidikan yang paling sesuai dengan mengacu pada protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku yaitu pembatasan fisik dan untuk mencegah penularan Covid-19. Melalui PJJ proses belajar dapat terus berlangsung tanpa perlu tatap muka dan kita tengah merancang sebuah bantuan untuk kuota dan sampai hari ini prosesnya masih berjalan dan kita membutuhkan kekurangan anggaran senilai Rp168.110.585.500,-

Selanjutnya proses transformasi 6 IAIN menjadi UIN, pada saat ini sudah diproses dan sudah terwujud UIN baru yakni perubahan dari IAIN Jember, IAIN Tulung Agung, IAIN Surakarta, IAIN Purwokerto, IAIN Bengkulu, IAIN Samarinda menjadi UIN, dan perkembangan saat ini Peraturan Pemerintah ke 6 IAIN tersebut sudah diusulkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Sekretariat Negara.

Yang ketiga, pendirian Universitas Islam Cyber Indonesia (*Cyber Islamic University*) dalam rangka membuka akses yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan tinggi keagamaan Islam, maka Kementerian Agama berencana menyelenggarakan pendidikan berbasis cyber. Wujud dari upaya ini adalah melakukan transformasi Kelembagaan di IAIN Cirebon menuju Universitas Islam Cyber Indonesia (*Cyber Islamic University*), dan IAIN

Cirebon ini merupakan pilot project dalam penyelenggaraan universitas berbasis *cyber*.

Kemudian perbaikan tata kelola birokrasi, perbaikan tata kelola set tata kelola dan layanan birokrasi sebagai salah satu semangat baru dari Kementerian Agama, dengan terus bertambahnya satuan kerja yang berpredikat zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bebas dan layani, semakin mencerminkan Kementerian Agama optimis dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Ditambah lagi Kementerian Agama sudah melaksanakan proses penyederhanaan sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekjen dari Eselon III dan IV pada bulan Desember 2020, dengan menyetarakan jabatan pengawas dan administrator pada jabatan fungsional di seluruh Indonesia.

Kemudian berikutnya yang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (PPP) Kementerian Agama, saya kira saya tidak ingin mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen. Pada dasarnya kita mendorong agar penambahan ASN melalui jalur PNS maupun PPPK bagi Kementerian Agama dapat dioptimalkan. Kemudian peningkatan akses mutu dan relevansi pendidikan agama Islam ada tujuh isu yang saat ini tengah dibangun, yang pertama adalah:

1. Pembentukan Majelis Masyai (MM) untuk penjaminan mutu pendidikan pesantren sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren,
2. Penguatan peran pesantren dan pendidikan keagamaan Islam dalam mengembangkan moderasi beragama,
3. Digitalisasi pembelajaran tradisi akademi pesantren dan pendidikan keagamaan Islam sebagai sumber rujukan belajar Islam yang bersanat,
4. Afirmasi dan fasilitasi pesantren dan pendidikan keagamaan Islam melalui penyediaan dan peningkatan mutu sarpras, peningkatan kualifikasi dan kompetensi ustadz, beasiswa santri, penjaminan mutu dan lain sebagainya,
5. Dukungan untuk implementasi program kemandirian pesantren berdasarkan rumusan peta jalan kemandirian pesantren,
6. Dukungan untuk memastikan entitas pesantren dan pendidikan keagamaan Islam menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19, dan yang
7. Dukungan pengembangan struktur Kelembagaan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren agar dapat naik menjadi Eselon I yaitu menjadi Direktorat Jenderal Pesantren dan Pendidikan Diniyah sebagai unit Eselon I pada Kementerian Agama,

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait dengan evaluasi program dan anggaran tahun 2021 dan isu-isu aktual. Sekali lagi kami menyampaikan penghargaan, apresiasi, dan terima kasih pada Pimpinan dan Anggota DPR RI Komisi VIII atas perhatian dan dukungannya selama ini. Terima kasih.

*Wallahul Muafiq Ila Aqwamith Thariq.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Dirjen. Walaupun tadi tidak dijelaskan soal dana abadi pesantren itu, Pak, itu penting itu.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA:

Oke, iya mengenai dana abadi pesantren sebagaimana tertuang di dalam Perpres bahwa itu bersumber pada LPDP dan pada dasarnya itu digunakan untuk investasi sumber daya manusia dan pada hari ini pesantren memiliki sebuah landasan hukum yang kuat untuk meningkatkan kapasitas pengelola pesantren, baik pada ustadz maupun tenaga kependidikannya untuk melakukan peningkatan pada kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia. Untuk sementara ini kami dalam pandangan kami, bahwa dana abadi ini dikelola bersama dengan LPDP dan arahnya pada investasi sumber daya manusia. Demikian Ketua.

KETUA RAPAT:

Pengelolaannya bukan di Kementerian Agama gitu?

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA:

Pengelolaannya di Kementerian Agama tetapi pengelolaan keuangannya di LPDP, itu karena eksplisit disebut bahwa sumber dana abadi pesantren, pesantren itu ada dari LPDP.

KETUA RAPAT:

Jadi masih belum *clear* ya soal, teknisnya belum ada ya?

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA:

Kita mungkin harus menurunkan pada tingkat kesepakatan bersama antar Kementerian Keuangan, LPDP, termasuk kami dan ada Dewan Penyantun di LPDP itu yang terdiri dari empat Kementerian Pak Sekjen ya, ada Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Ristek BRIN. Nanti kita bicara dan Dewan Penyantun ini mengalokasikan nantinya, hari ini kita baru dapat payungnya saja.

KETUA RAPAT:

Oh ini baru legalitasnya saja ya, soal teknisnya belum ada juknisnya.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA:

Iya payung nantinya, iya kesepakatan bersama antar empat domain Dewan Penyantun ini akan menjadi arah bagi Direktur Utama LPDP untuk slot anggaran bagi pesantren.

KETUA RAPAT:

Oh ini lebih kepada beasiswa sebetulnya ya.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA:

Sebetulnya boleh juga diperkenankan untuk pengembangan kapasitas peserta misalnya di mahadali dan lain sebagainya, sebagaimana kalau sementara kami berpikir bahwa seperti LPDP pada saat ini ada *bridging*, ada program magang, dan yang lain sebagainya tetapi investasinya lebih pada sumber daya manusia.

KETUA RAPAT:

Oke terima kasih Pak Dirjen. Selanjutnya Dirjen Bimas Islam Prof. Kamarudin Amin, mohon diperhatikan waktunya Pak Dirjen.

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM (Prof. KAMARUDIN AMIN):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati.
Teman-teman pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama yang saya hormati.

Karena waktu sangat terbatas, maka saya langsung kepada point APBN Dirjen Bimas Islam tahun 2021. Berdasarkan surat Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37/19 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian Agama, Dirjen Bimnas Islam mendapatkan pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp5.757.112.044.000,- namun dengan dinamika perkembangan pandemi Covid-19 maka anggaran Dirjen Bimas Islam turun sebesar Rp342.743.616.000,- menjadi Rp5.414.368.428.000. Dari jumlah tersebut hingga naskah ini dibuat pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 telah terserap sebanyak 66% atau sebesar Rp3.564.776.432.023,-

Pagu alokasi anggaran sebagaimana tersebut diatas berasal dari beberapa sumber pendanaan yaitu rupiah murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) nikah, rujuk, dan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Rincian sumber dana tersebut adalah sebagaimana yang kita bisa lihat pada tabel I Pagu Alokasi Anggaran Dirjen Bimas Islam 2021 berdasarkan sumber dana. Jadi ada tiga sumber dana Bimas Islam yaitu rupiah murni, PNBP, dan Surat Berharga Syariah Negara.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Selanjutnya sumber negara berdasarkan sumber dana setelah terdampak penghematan anggaran, maka pagu alokasi anggaran dari sumber rupiah murni yaitu Rp4.531.001.000.000,- turun sebesar Rp344 miliar 66 juta sekian, yang saat ini sudah terealisasi sebanyak 70% atau sebesar Rp3.159.000.000.000,- sekian. Sumber dana dari Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp682.000.000.000,- sekian, sedangkan yang berasal dari sumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp201.251.000.000,- di tabel II bisa kita lihat pada halaman lima. Kemudian bahwa pagu alokasi anggaran Dirjen Bimas Islam berdasarkan program ada dua program di Bimas Islam; yang pertama adalah program kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama; yang kedua dukungan manajemen. Untuk program yang pertama semula Rp1.746.000.000,- kemudian untuk dukungan manajemen sebesar Rp4.011.000.000.000,- jumlah total anggaran Bimas Islam Rp5.000.000.000.757,-

Selanjutnya kita melihat pada tabel III yaitu alokasi anggaran Bimas Islam berdasarkan unit Eselon II, ada lima unit Eselon II di Bimas Islam, yang pertama Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah anggarannya Rp811.530.000.000,- kemudian ada penambahan Rp4.840.000.000,- menjadi 816 miliar, realisasinya 48%, kemudian Pemberdayaan Zakat dan Wakaf anggaran semula 61 miliar kemudian ada penghematan sebesar 5,9 miliar menjadi 63 miliar, kemudian selanjutnya saya kira saya tidak perlu bacakan semuanya kita bisa lihat di tabel III tentang anggaran masing-masing Direktorat, kemudian realisasinya totalnya adalah 66% total serapan anggaran pada hari ini.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Selanjutnya kami kita bisa lihat pada Pagu Anggaran 2021 berdasarkan jenis pengeluaran ada belanja pegawai, ada belanja barang operasional, dan belanja non operasional. Belanja pegawai sebesar 3,6 triliun sekian kemudian ada penghematan anggaran sebesar 250 miliar, sehingga menjadi 3,3 triliun 3.354.000.000.000 realisasi 73%, kemudian belanja barang operasional semula 358 miliar menjadi 358.522.000.000 serapan anggaran 64%, belanja non operasional dengan serapan 52%, total serapan 66%.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Selanjutnya capaian kinerja anggaran Dirjen Bimas Islam tahun 2021. Capaian kinerja anggaran Bimas Islam berisi kegiatan-kegiatan prioritas dalam rencana kerja pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dirjen Bimas Islam, sesuai dengan tugas dan fungsinya arah kebijakan Dirjen Bimas Islam menyesuaikan dengan agenda-agenda yang telah ditetapkan Pak Presiden sebagai prioritas nasional. Sebagaimana terkandung dalam RPJMN Nasional 2020-2024. Prioritas nasional tersebut terutama adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Berdasarkan Surat Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif 2021.

Selanjutnya kita lihat pada halaman 16, isu-isu aktual pertama revitalisasi UPQ berstandar internasional. Meskipun ini belum ada anggarannya tetapi kami tetap memasukan sebagai isu-isu aktual. Kami terus berusaha dan mengikhtarkan kami terus presentasi di Bappenas. Dan Menteri Agama akan mengirimkan surat untuk penambahan anggaran UPQ berstandar internasional ini. Tentu *reasoning*-nya sudah kami sampaikan beberapa kali dalam rapat yang sama. Yang kedua adalah revitalisasi KUA. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor urusan agama, Menteri Agama telah menetapkan revitalisasi KUA sebagai program prioritas Kementerian Agama.

Pada tahun 2021 ini akan diterapkan program revitalisasi KUA pada 106 KUA seluruh Indonesia. Revitalisasi KUA akan berfokus pada tiga hal; yaitu pertama perbaikan infrastruktur KUA, perluasan cakupan layanan KUA, dan yang ketiga adalah peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia KUA. Isu aktual berikutnya adalah peningkatan honorarium penyuluh agama berstandar UMP. Penyuluh agama Islam non PNS memainkan peran strategis dalam memperkuat kehidupan beragama dengan tugas untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan melalui pendekatan bahasa agama dengan menjalankan fungsinya secara optimal. Dan ini juga sampai sekarang belum ada anggarannya, tapi kami terus mengusahakan di Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Kemudian selanjutnya adalah penguatan moderasi beragama. Kemudian isu berikutnya adalah kurangnya SDM penghulu. Penghulu seluruh Indonesia berjumlah 8.978 orang. Jumlah ini masih setengah dari kondisi ideal untuk melayani pernikahan 2 juta peristiwa nikah setiap tahunnya yang tersebar di 5.897 KUA seluruh Indonesia. Kekurangan penghulu dalam jangka 10 tahun ke depan setengahnya akan masuk masa purna tugas sebagai PNS atau dirata-ratakan pensiun sebanyak 400 orang setiap tahunnya.

Kurangnya kuantitas penghulu ini tentu akan berkorelasi pada kualitas pelayanan publik. Saat ini Dirjen Bimas Islam berupaya menambah kuota penghulu, namun formasi yang diperoleh hanya 150 orang setiap tahunnya dan kondisi ini tentu dukungan dari Komisi VIII akan sangat membantu merealisasikan target pemenuhan kuota penghulu di seluruh Indonesia. Berdasarkan data tersebut setidaknya dibutuhkan 400 formasi penghulu setiap tahunnya.

Kemudian selanjutnya sertifikasi tanah wakaf sinergitas dengan Kementerian ATR dan BPN. Sertifikasi tanah wakaf merupakan bagian penting dalam pengamanan dan legalitas aset wakaf. Tahun ini kita bekerja sama dengan ATR/BPN Insya Allah minimal 5 ribu wakaf tanah wakaf akan disertifikasi.

Kemudian bimbingan perkawinan terdampak Covid-19. Renasi dari isu *stunting* dalam hal ini bimbingan perkawinan hanya bersumber dari PNBP, sehingga tidak ada *support* dari rupiah murni sama sekali, sehingga sangat rentan terdampak anggaran disaat pandemi sekarang ini. Khususnya pada penerimaan PNBP yang praktis turun karena berkurangnya peristiwa nikah di luar kantor sebagai satu-satunya sumber penerimaan PNBP. Dengan kondisi ini diestimasikan pelaksanaan tidak akan terserap optimal hingga akhir tahun. Ditambah dengan bimbingan perkawinan pada remaja usia nikah yang banyak menyasar anak usia sekolah, sedangkan pertemuan tatap muka masih belum dibuka kembali.

Dengan sudah turunnya level PPKM di beberapa lokasi, maka penerimaan PNBP akan kembali bertambah, namun dengan memperhatikan tenggat waktu dipenghujung tahun, maka diproyeksikan tidak akan terserap optimal sehingga perlu ada kebijakan alternatif, salah satunya mengalihkan anggaran yang diestimasikan tidak terserap untuk kebutuhan prioritas lainnya.

Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.

*Wabillahi taufik walhidayah.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Dirjen Bimas Islam Prof. Kamarudin. Selanjutnya Dirjen Bimas Kristen Pak Thomas silakan Pak.

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN (Prof. THOMAS PENTURY):

Terima kasih Pimpinan Komisi VIII.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Syalom
Om Swastiastu
Namo Buddhaya, dan
Salam Kebajikan*

Salam sehat untuk kita sekalian.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI.
Teman-teman Eselon I dan II yang hadir mengikuti rapat.

Kami akan menyampaikan tiga bagian dari yang diminta oleh Komisi VIII dalam rapat evaluasi program dan isu-isu aktual. Untuk mempersingkat waktu kami menyampaikan sebagai berikut:

Pada kesempatan yang ini perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat. Yang senantiasa memberikan semangat, perhatian, dan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran, sehingga Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama senantiasa berusaha untuk meningkatkan seluruh tugas ,fungsi dalam tanggung jawab pada Kementerian Agama dan kita semua.

Selanjutnya kami akan menyampaikan evaluasi program dan anggaran tahun 2021 pada Direktorat Jenderal Bimas Kristen, serta beberapa isu aktual di bidang pembangunan agama dan pendidikan keagamaan, serta alternatif solusinya. Bagian pertama postur anggaran tahun 2021, dalam rangka melaksanakan rencana kerja tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Direktorat Jenderal Bimas Kristen mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1.870.024.490.000,- Berdasarkan Surat Menteri Agama Nomor 419 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian Agama tahun 2021. Anggaran tersebut selanjutnya dalam pelaksanaannya mengalami perubahan yang sangat dinamis, baik berupa penambahan anggaran maupun penghematan anggaran belanja Dirjen Bimas Kristen tahun 2021 seperti dalam tabel I.

Yang pertama, alokasi adalah Rp1.870.028.494.000,- dan mendapat penambahan Rp4.210.393.000,- dan kemudian *refocusing* Rp55.955.391.000,- maka pagu akhir adalah Rp1.818.283.496.000,- berdasarkan tabel diatas pagu di Bimas Kristen saat ini adalah yang tertera pada tabel I. Perubahan jumlah anggaran ini dikarenakan ada tambahannya, adanya tambahan anggaran untuk pembelajaran jarak jauh dan kebijakan Pemerintah berupa *refocusing* belanja pada RKA-K/L Dirjen Bimas Kristen tahun 2021 untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan antara lain untuk pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, percepatan program pemulihan ekonomi nasional, dan Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Kebijakan *refocusing* belanja tahun 2021 ini dilaksanakan dengan melakukan penghematan anggaran belanja yang terdapat pada RKA-K/L Dirjen Bimas Kristen tahun 2021 dengan kriteria-kriteria tertentu sebagaimana ditentukan dalam Surat Menteri Keuangan tentang *Refocusing* dan Realokasi belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2021. Namun pengurangan jumlah anggaran tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan tetap dalam kordinasi dan pengawasan DPR RI, dalam hal ini

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat.

Dua *refocusing* dan penambahan anggaran belanja. *Refocusing* dan relokasi belanja Dirjen Bimas Kristen dilaksanakan sebanyak empat tahap berdasarkan Surat Menteri Agama dengan total penghematan sebesar Rp55.950.391.000,- dengan rincian seperti pada tabel II berikut. Dampak *refocusing* atau penghematan belanja ini adalah pada perubahan postur anggaran Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama tahun anggaran 2021, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel III halaman 4 dari buku yang kami siapkan.

Bagian kedua penambahan anggaran, dalam mendukung program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Direktorat Jenderal Bimas Kristen mendapatkan tambahan anggaran untuk pemberian bantuan kuota internet kepada siswa, mahasiswa, guru, dan dosen pada satuan pendidikan keagamaan Kristen mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi dengan total anggaran Rp4.210.393.000,- untuk periode Mei dan Juni 2021. Anggaran tersebut sudah terealisasi sebesar Rp1.398.840.000,- atau realisasi sebesar 33,22%.

Dalam pelaksanaannya untuk siswa dan guru pada pendidikan tingkat dasar dan menengah hanya di injeksi pada bulan Mei 2021, karena Juni pada bulan Juni sudah masuk pada libur sekolah, sedangkan mahasiswa dan dosen di injeksi bulan Mei dan Juni 2021. Kondisi demikian membuat anggaran tersebut tidak dapat diserap seluruhnya. Sisanya pada periode Mei dan Juni 2021 akan dipergunakan untuk injeksi pada bulan September, Oktober, dan November 2021.

Evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021 berdasarkan jenis kewenangan pusat dan daerah, proporsi anggaran sebesar Rp136.347.691.000,- atau sebesar 7,50% berada di satker pusat dan sebesar Rp1.681.935.850.000,- atau 92,50% berada di satker daerah atau instansi vertikal, yang terdiri atas 34 satker kanwil, 314 satker kabupaten/kota, dan 7 perguruan tinggi keagamaan Kristen negeri, dan 3 sekolah menengah teologi Kristen negeri di Indonesia. Realisasi anggaran pusat dan daerah per tanggal 24 September 2021 sebesar Rp1.152.771.515.042,- dari Pagu Rp1.818.283.496.000,- atau sebesar 63,40% dengan rincian realisasi per kewenangan dalam tabel IV halaman 5 buku yang kami sampaikan.

Sisa anggaran satker pusat sebesar Rp84.841.251.316,- sebagian akan digunakan untuk pembayaran tunjangan penyuluh agama Kristen non PNS tahun 2020 yang tentunya bergantung pada hasil review Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, kedua pembayaran tunjangan profesi dosen non PNS periode Januari-Juni 2021 yang dalam penilaian beban kerja dosen yang dilaporkan setelah bulan Juni 2021, dan yang ketiga pemberian beasiswa S3 dan pemberian beasiswa afirmasi pendidikan tinggi bagi orang asli Papua.

Sampai dengan minggu ketiga September 2021 realisasi tertinggi adalah satker daerah sebesar 65,48% dan pada belanja barang, belanja modal masih dibawah 50%, karena adanya penundaan pelaksanaan kegiatan

sebagai dampak pemberlakuan PPKM darurat. Sebagai upaya percepatan realisasi anggaran Direktorat Jenderal Bimas Kristen melakukan perhitungan estimasi anggaran yang berpotensi tidak terserap untuk direalokasikan kepada program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategis saat ini, seperti yang dijelaskan pada bagian terdahulu. Realisasi anggaran berdasarkan belanja terbesar adalah pada jenis belanja pegawai sebesar 67,22%, belanja barang 51,11%, belanja modal sebesar 50,17%, dan bantuan sosial sebesar 56,07%.

Adapun realisasi berdasarkan belanja tersebut sebagaimana terlihat pada tabel VII halaman 7. Dari sisi sumber dana tahun anggaran 2021 berasal dari dua sumber pendanaan yaitu rupiah murni sebesar Rp1.786.890.198.000,- dan dari penerimaan bukan pajak sebesar Rp31.474.298.000,- Realisasinya dapat dilihat pada tabel VIII halaman 8 dari buku yang disampaikan.

Dalam rangka penanganan Covid-19 Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama telah melakukan *refocusing* anggaran untuk pemberian bantuan penanganan pandemi Covid-19 pada rumah ibadah, Lembaga Keagamaan Kristen, dan Lembaga Sosial Keagamaan Kristen. Selain itu dialokasikan juga anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perkantoran antara lain pembelian alat pelindung diri, penguat daya tahan tubuh dalam bentuk vitamin, pelaksanaan swab, pembelian lisensi *Zoom* untuk paket internet, dan pendukung lainnya dalam rangka penanganan dan penjangkauan Covid-19, ada pun besaran anggarannya adalah Rp41.114.881.000,-. Sampai dengan awal September 2021 telah terealisasi Rp22.997.315.000,- atau sebesar 55,93%.

Selanjutnya sisa anggaran tersebut akan direalisasikan sampai dengan Desember 2021. Kendala pelaksanaan anggaran, kendala pelaksanaan anggaran tahun 2021 secara umum adalah akibat pandemi covid yang kemudian berdampak pada pemberlakuan PPKM darurat, sehingga terjadi penundaan pelaksanaan program dan kegiatan. Beberapa kendala lain yaitu anggaran belanja modal yang diblokir, kebijakan *refocusing*, dan realokasi anggaran sebanyak empat tahap. Pelaksanaan *refocusing* dan realokasi berdampak pada pencapaian target dan sasaran program. Dan untuk mempertahankan capaian target dan sasaran program Direktorat Jenderal Bimas Kristen melakukan revisi anggaran belanja internal. Revisi anggaran dilakukan memerlukan review oleh Irjen termasuk yang melibatkan banyak satker. Untuk mengatasi kendala tersebut Dirjen Bimas Kristen melakukan *early warning* pelaksanaan kegiatan untuk mengurangi penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun, seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, berupa penyusunan jadwal kegiatan yang disesuaikan dengan rencana penarikan dana.

Isu aktual dan solusinya ada enam isu aktual masing-masing pertama sosialisasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2021. Perlunya sosialisasi secara intens kepada umat Kristen sesuai Surat Edaran Menteri Agama Nomor 25 tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan atau Keagamaan di tempat ibadah pada masa

pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3, level 2, *coronavirus disease* tahun 2020 di wilayah Jawa dan Bali, serta PPKM level 4 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua, PPKM level 3, level 2, dan level 1 sesuai dengan kriteria zonasi serta penerapan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan seterusnya, sehingga umat Kristen di Indonesia mengetahui dan mengimplementasikan surat edaran tersebut, termasuk kegiatan untuk peduli lindungi yang telah dikerjakan oleh 70 lembaga kerja yang ada di Indonesia.

Kedua penguatan perspektif moderasi beragama, moderasi beragama dan kerukunan umat beragama merupakan salah satu tugas utama Kementerian Agama dalam mewujudkan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia. Ketiga kebijakan nasional terkait moderasi beragama digaungkan Dirjen Bimas Kristen, telah memulai dengan menerbitkan beberapa buku sebagai referensi moderasi beragama dalam perspektif Kristen untuk menunjang pengarus utamaan moderasi beragama, kemudian lahir buku mozaik moderasi beragama dalam perspektif Kristen yang diterbitkan tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2021 sementara disusun dua naskah akademik dalam bentuk buku yaitu moderasi beragama, perspektif teologi Kristen, dan kerukunan beragama, perspektif pendidikan agama Kristen yang akan dijadikan rujukan dalam review kurikulum pendidikan agama Kristen pada Lembaga Pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan pendidikan tinggi. Direktorat Jenderal juga mempedomani peta jalan atau roadmap moderasi beragama yang dibuat oleh kelompok kerja moderasi beragama Kementerian Agama. Sebagai salah satu implementasi moderasi beragama Dirjen Bimas Kristen juga menyelenggarakan event keagamaan berskala nasional pada tahun 2022 yang akan datang di Yogyakarta.

Yang ketiga persiapan tahun toleransi, Kementerian Agama akan mencanangkan tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Saat ini Pusat Kerukunan Umat Beragama yang merupakan unit kerja dibawah koordinasi Sekretariat Jenderal dengan beberapa *stakeholder* termasuk Direktorat Jenderal Bimas Kristen menyiapkan secara komprehensif pelaksanaan tahun toleransi. Salah satu target dicanangkannya adalah indeks keberagamaan atau *religious city index*. Sebagai bagian dari Kementerian Agama tentu Direktorat Jenderal Bimas Kristen harus mengambil peran dalam mensukseskan tahun toleransi beragama di tahun 2022, dengan menyiapkan program kegiatan yang mendukung pelaksanaan dengan melibatkan tokoh agama, Lembaga Keagamaan bersama umat Kristen di Indonesia.

Yang ke bagian D transformasi digital, kemudian bagian E perbaikan tata kelola birokrasi, dan bagian F adalah afirmasi pendidikan tinggi bagi generasi Papua. Dalam kerangka mendukung Impres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Surat Edaran Menteri Agama Nomor 19 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Kementerian Agama kita cinta Papua. Dirjen Bimas Kristen merespon melalui program afirmasi pendidikan tinggi bagi generasi muda Papua, berupa pemberian beasiswa bagi putra-putri orang asli Papua, yang kemudian ditempatkan pada tujuh Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri di seluruh Indonesia pada tahun 2020. Dan tahun

2021 diperluas dengan melibatkan Perguruan Tinggi Umum seperti UKI Jakarta, UK Petra Surabaya, UK SW Salatiga, UKDW Yogyakarta, UPH Jakarta, Universitas Advent Bandung, dan UK Maranatha Bandung, serta UKI Ambon, serta Universitas Cendrawasih di Jayapura.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, yang membicarakan evaluasi program tahun 2021 dan isu-isu aktual. Besar harapan kami akan mendapat dukungan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat dalam pelaksanaan. Selanjutnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII RI yang terhormat.

Atas perhatian dan kerja sama dalam peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Semoga Tuhan menolong kita sekalian.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Syalom.
Om santi santi santi om.*

KETUA RAPAT:

Iya terima kasih Pak Dirjen Pak Thomas. Selanjutnya kami persilakan dari Dirjen Bimas Katolik, Pak Yohanes silakan, Pak.

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK (YOHANES):

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Syalom
Om Swastiastu
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan
Salam sejahtera untuk kita sekalian.*

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI.

Untuk mempersingkat waktu, maka kami sampaikan pertama-tama adalah ucapan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta setulus-tulusnya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI atas perhatian dan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan program dan anggaran khususnya pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

Selanjutnya izinkan kami menyampaikan penjelasan mengenai evaluasi program dan anggaran tahun 2021, serta isu-isu aktual yang menyertainya. Kami akan langsung kepada slide halaman 8 dan 9 atau buku dihalaman 15. Dalam proses pelaksanaan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2021. Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik mendapat *refocusing* atau pemotongan sebanyak empat kali sebagaimana tergambar

dalam tabel-tabel berikut ini. Pagu awal yang dipercayakan kepada kami adalah Rp899.724.298.000 lalu mengalami *refocusing* tahap I, tahap II, tahap III, dan tahap IV dengan total Rp30.991.494.000,- sehingga pada pagu anggarannya menjadi Rp868.732.804.000,-

Pada slide nomor 10, kita melihat bahwa evaluasi pelaksanaan pagu anggaran di Dirjen Bimas Katolik sampai dengan hari ini atau tepatnya pada tanggal 21 September 2021 itu dilihat dari data OM-SPAN, maka Dirjen Bimas Katolik pada tahun 2021 pada realisasi triwulan yang ketiga itu mencapai 60% keterserapan dengan Pagu Anggaran 868,7 miliar yang sudah terealisasi 549,1 miliar. Artinya terserap 63,21% dan masih tersisa anggaran 319,5 miliar.

Untuk evaluasi, realisasi per jenis kegiatan Dirjen Bimas Katolik pada tahun 2021 per 21 September 2021 teralokasikan untuk beberapa kegiatan terutama adalah peningkatan akses mutu kesejahteraan dan subsidi pendidikan tinggi agama Katolik, pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama Katolik, pengelolaan dan pembinaan urusan agama Katolik, dukungan manajemen, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Katolik, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan agama Katolik, dan penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan bimas Katolik. Seperti sudah disampaikan maka terserap 549,1 miliar dan masih tersisa Rp319,5 miliar. Untuk berdasarkan keterserapan pusat dan daerah, untuk kantor pusat dengan pagu 80,5 miliar dan kantor daerah 788,6 miliar, maka tersisa atau terealisasi untuk kantor pusat 45,6 miliar dan untuk kantor daerah Rp503,5 miliar.

Kemudian untuk realisasi penanganan pandemi covid pada Dirjen Bimas Katolik tahun 2021 per 21 September 2021 tergambar pada tabel berikut ini pada halaman 13 pada slide nomor 13. Untuk kantor pusat dengan pagu Rp1,9 miliar terealisasi Rp572.3Miliar atau 29,15% dan untuk kantor daerah dengan pagu Rp2,16 miliar terealisasi Rp1,05 miliar, artinya 48,77%, dan untuk keseluruhannya masih ada Rp2,4 miliar.

Kemudian untuk realisasi prioritas nasional Dirjen Bimas Katolik tahun 2021 per 21 September 2021 tergambar pada tabel IX halaman 17 dan slide nomor 14 halaman 14. Dimana kita menjalankan 8 program yaitu program Indonesia pintar untuk di sekolah menengah agama Katolik, kemudian program Indonesia pintar KIP kuliah dan bidikmisi, kemudian tunjangan profesi guru PNS ada non PNS, dan program bantuan operasional sekolah, sarana dan prasarana bidang pendidikan, bantuan operasional perguruan tinggi negeri, dan pembelajaran jarak jauh untuk kuota internet bagi siswa dan guru sekolah-sekolah dasar dan menengah, dan bantuan PJJJ kuota internet untuk mahasiswa dan dosen perguruan tinggi, dengan pagu anggaran Rp343.941.000.000,- terealisasi Rp178.758.000.000,- 51,97% dan masih tersisa anggaran Rp165,183 juta.

Untuk isu-isu aktual yang pertama usul revisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Mengapa penting revisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 ini,

karena pendidikan keagamaan Katolik pada Kementerian Agama hanya mengakomodir pendidikan dasar yang disebut taman seminari atau setingkat paud, sedangkan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum terakomodir.

Yang kedua diskresi syarat LPTK penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) berdasarkan Permen Dikbud Nomor 87 Tahun 2013 Pasal 3 ayat (2) tentang Program Pendidikan Profesi Guru pra jabatan, bahwa syarat untuk menjadi LPTK penyelenggaraan adalah perguruan tinggi yang minimal institusinya akreditasinya B, sementara faktanya perguruan tinggi keagamaan Katolik binaan Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama akreditasi institusinya belum ada yang B, karena itu diusulkan untuk mendapatkan diskresi pesyaratannya yaitu LPTK penyelenggara yang sudah terakreditasi B prodinya, total target yang direncanakan akan ikut PPG tahun 2021 sebanyak 197 guru pendidikan agama Katolik.

Isu aktual yang ketiga penguatan moderasi beragama, dengan melakukan internalisasi perspektif moderasi beragama melalui pembinaan moderasi beragama bagi ASN Dirjen Bimas Katolik Pusat dan Daerah, *review* bahan ajar bermuatan moderasi beragama, penyiapan master data induk pegawai non PNS Dirjen Bimas Katolik Pusat dan Daerah, penyiapan master data induk rumah ibadah agama Katolik, penyusunan profil budaya lokal dan destinasi wisata bernuansa keagamaan Katolik.

Untuk kendala-kendala yang dihadapi dapat terlihat pada slide halaman 16, bahwa kendala keterserapan anggaran itu ada tiga hal yang dihadapi yaitu terjadinya situasi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan cukup banyak satker-satker daerah dan juga satker pusat yang belum dapat memaksimalkan keterserapan anggarannya, lalu ditambah kebijakan *refocusing* yang berlaku secara nasional, sehingga menimbulkan revisi anggaran satker pusat dan daerah sehingga menimbulkan pula ketidakseimbangan antara keterserapan anggaran dengan realisasi yang dilaksanakan.

Upaya yang dilakukan untuk percepatan realisasi anggaran tahun anggaran tahun 2021 yang tersisa beberapa bulan kedepan ini, yang pertama adalah meningkatkan kordinasi antara unit Eselon II dan para PPK untuk mempercepat realisasi anggaran, baik melalui nota dinas maupun rapat-rapat kordinasi, yang kedua mempercepat penyelesaian usulan revisi baik satker pusat maupun daerah, yang ketiga mendorong untuk percepatan program prioritas nasional dan Kementerian, dan yang keempat mendorong satker daerah untuk mempercepat realisasi program.

Demikian paparan yang dapat kami sampaikan dihadapan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI atas perhatian dan dukungan dalam peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Om santi santi santi om
Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Dirjen Bimas Katolik. Selanjutnya Pak Dirjen Bimas Hindu Pak Tri Handoko silakan, Pak.

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU (TRI HANDOKO SETO):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua.
Namo Buddhaya
Om Swastiastu

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, juga
Yang saya hormati teman-teman semua para pejabat Eselon I dan II di
Kementerian Agama Republik Indonesia,

Dalam kesempatan yang baik ini perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat yang selalu memberikan dukungan dan perhatian terhadap upaya-upaya peningkatan kinerja Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

Bapak/Ibu sekalian.

Izinkan kami menyampaikan anggaran yang ada di Direktorat Jenderal Bimas Hindu, kita memiliki pagu awal sebesar Rp803.751.045.000,- mengalami pemotongan pada *refocusing* satu sampai dengan empat sebesar Rp45.831.947.000,- sehingga pagu akhir kami sebesar Rp757.919.098.000,-. Sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 realisasi anggaran di Dirjen Bimas Hindu mencapai Rp505.378.073.507,- atau sebesar 66,68%. Jika dilihat dari fungsinya, maka untuk fungsi agama sudah terserap 75,45%, sedangkan untuk pendidikan itu terserap 66,45%, ini tentu terdistribusi dalam berbagai program. Yang selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan satker pusat dan daerah, maka satker pusat saat ini telah terealisasi 71,45%, sedangkan satker daerah provinsi, kabupaten/kota 68,56%, dan satker daerah untuk PTKHN sebesar 60,01%.

Bapak/Ibu sekalian.

Jika dilihat dari fungsi dari jenis belanjanya, maka belanja pegawai sebesar 67,93%, belanja bansos 55,64%, belanja barang 67,94%, dan belanja modal sebesar 48,60%. Lalu berdasarkan sumber dana rupiah murni terealisasi sebesar 66,99% dan PNBPN sebesar 49,79%.

Bapak/Ibu sekalian.

Dari keseluruhan belanja itu kami juga menganggarkan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp8.775.664.000,- yang sampai saat ini terealisasi sebesar Rp5.704.506.947,- atau sebesar 66,1%.

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati.

Selain menjalankan program-program bantuan, baik itu bantuan rumah ibadah, bantuan bea siswa, bantuan pasaman, dan sebagainya Direktorat Jenderal Bimas Hindu tahun 2021 mencanangkan 8 program *quick win*. Yang pertama adalah Prambanan sebagai destinasi religi umat hindu nusantara dan dunia, kemudian Weda Dalam Genggaman ini berupa digitalisasi kitab suci, kemudian gerakan umat peduli punia atau dana masyarakat sejenis zakat, kemudian penerangan STHD Klaten, Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten, kemudian pencanangan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa menuju *world class university*, lalu penerangan pasraman formal utama widya pasraman ganesa perwati di Banyuwangi. Jika berhasil ini adalah salah satu-satunya pasraman formal negeri yang dimiliki oleh Kementerian Agama, lalu ada epasraman dan digital arsip. Keseluruhan program-program *quick win* ini ditargetkan tahun ini bisa terealisasi dan saat ini yang sudah di *launching*, baru pencanangan UHN I Gusti Bagus Sugriwa menuju *world class university* kemarin tanggal 11 di *launching* oleh Pak Menteri Agama, program-program *quick win* yang lainnya kemungkinan akan di *launching* sekitar bulan Oktober dan November.

Lalu terkait dengan kendala-kendala pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021, yang pertama tentu peningkatan covid pada bulan Juni-Juli dan Agustus itu yang meningkat secara drastis membuat beberapa program, seperti Usawa Dharmagita atau MTQ kalau di Islam itu yang kita buat semi virtual melalui *taping* ke daerah-daerah terhambat dan sekarang baru saja bisa kita laksanakan lagi dan nanti pada tanggal 17 Oktober akan kita lakukan pembukaan Usawa Dharmagita secara nasional di Jakarta menggunakan teknik semi virtual.

Lalu masih adanya kendala distribusi bantuan pembelajaran jarak jauh, dalam hal ini pihak Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu kesulitan untuk mendapatkan kesepakatan dengan *provider celluler*. Nah nanti oleh karenanya kami dari Direktorat Jenderal mengambil langkah-langkah ya yaitu dengan menarik anggaran di perguruan tinggi, kita tarik ke pusat lalu kita distribusikan dari pusat. Isu-isu aktual saat ini adalah pembelajaran jarak jauh, tadi saya sampaikan bagaimana persoalan ini harus kita tangani karena bantuan kuota menjadi sangat penting dan berarti bagi para peserta didik.

Yang berikutnya adalah adanya persoalan tunjangan profesi guru. Pada tahun 2020 telah lulus guru-guru melalui program PPG sebanyak 400, sekitar 400 guru, namun demikian sesuai dengan aturan memang sesungguhnya guru yang sudah lulus PPG dan memiliki NRG pada tahun berjalan bisa diberikan tunjangan pada tahun berikutnya mulai bulan Januari.

Nah persoalannya yang kemarin itu ada ketidak tepatan administrasi NRG yang mestinya keluar setelah Sertifikat Pendidik (Serdik), yang kemarin serdiknya keluar bulan Januari, NRG-nya keluar Desember 2020 sehingga secara aturan ini tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dibayarkan kalau mau satu lap. Namun ternyata pada kasus-kasus yang sama di Kementerian Pendidikan ini bisa dibayarkan, akhirnya para guru kami juga menuntut membanding-bandingkan, sementara kita belum ada anggaran dan kemarin kami rapat dengan Direktorat Jenderal GTK Kemendikbud ya, bahwa kami minta penjelasan mengenai proses yang terjadi supaya kalau pun kami akan membayarkan itu dasarnya kuat begitu.

Lalu pembelajaran tatap muka ya kami sudah melaksanakan pendataan ya kepada seluruh Lembaga Pendidikan Keagamaan Hindu. Pada umumnya mereka sudah siap untuk melaksanakan PTM ya terbatas, namun demikian tentu ini disesuaikan dengan keputusan satgas covid di daerah masing-masing.

Kemudian terkait dengan adanya covid ini, kita juga memberikan bantuan rumah ibadah untuk penanganan covid, karena Pak Menteri juga minta agar umat kita diberikan masker ya banyak yang masih belum menggunakan masker, kemudian di rumah-rumah ibadah juga ada yang masih kesulitan. Ya karena persoalan covid ini, maka kami merevisi anggaran kita untuk menyediakan 40 lokasi bantuan tempat ibadah masing-masing 10 juta, sehingga ada anggaran 400 juta yang sekarang sedang kami umumkan ke daerah-daerah untuk daerah mengajukan permintaannya.

Bapak/Ibu sekalian.

Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan dalam rapat dengar pendapat yang membahas tentang evaluasi program dan anggaran, dan isu-isu aktual Dirjen Bimas Hindu tahun 2021. Kami mengharapkan masukan dan dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat untuk peningkatan kualitas pengelolaan APBN Dirjen Bimas Hindu pada masa-masa yang akan datang. Sekali lagi kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat. Atas perhatian dan kerja sama dalam peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Om santi santi santi om*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Tri Handoko dari Dirjen Bimas Hindu. Selanjutnya dari Dirjen Bimas Buddha Pak Caliadi silakan, Pak.

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA (CALIADI):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam kesejahteraan

Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi VIII DPR RI yang saya hormati.
Para Eselon I dan II yang saya hormati.

Untuk mempersingkat waktu, saya tidak berpanjang lebar membaca yang lain-lain, saya langsung kepada substansi. Pada kesempatan yang baik ini perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan perhatian terhadap upaya peningkatan kinerja pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Selanjutnya anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tahun 2021 sebesar Rp272.661.176.000,- hingga periode triwulan ke III Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha telah mengalami empat kali penghematan dengan total Pagu Anggaran penghematan sebesar Rp19.148.971.000,- sehingga Pagu per tanggal 20 September 2021 sebesar Rp253.512.205.000,-. Realisasi anggaran pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha per tanggal 20 September sebesar Rp170.276.900.158,- atau sebesar 68,74%. Realisasi tertinggi terdapat pada fungsi agama dengan presentase sebesar 68,79, sedangkan fungsi pendidikan telah terealisasi sebesar 68,73. Capaian ini menunjukkan bahwa adanya konsistensi per fungsi dalam hal serapan anggaran dengan selisih anggaran 0,6%. Dari per hari ini serapan pada Dirjen Bimas Buddha sebesar 71,54% dan melampaui tadi yang ditentukan oleh Menteri Keuangan pada triwulan ketiga sebesar 70%.

Selanjutnya realisasi tertinggi terdapat pada program PAUD dan wajib belajar 12 tahun, realisasi anggaran yang dicapai yakni Rp20.583.670.062,- atau sebesar 85,37 dari Pagu Anggaran sebesar Rp28.795.600.000,- sedangkan capaian terendah berada pada program kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan realisasi sebesar Rp15.345.599.267,- atau sebesar 50,24%. Rendahnya capaian ini disebabkan karena adanya wilayah berdampak kepada PPKM menyebabkan terbatasnya ruang gerak melaksanakan anggaran. sehingga jadwal kegiatan menjadi bergeser. Realisasi per jenis belanja serapan anggaran tertinggi terdapat pada belanja modal dengan prosentase mencapai 73,75% dari anggaran Rp3.552.100.000,- serapan yang paling rendah adalah belanja bantuan sosial dengan prosentase 57,86. Rendahnya serapan realisasi belanja bantuan sosial, dikarenakan calon penerima bantuan PIV atau bidik misi tidak memenuhi persyaratan seperti nilai IPK yang kurang dari 3, serta proses validasi nomor rekening mahasiswa penerima bantuan.

Per tanggal 20 September 2021 realisasi belanja daerah lebih tinggi dibandingkan realisasi pusat, dengan selisih sebesar 2,52%, dari daerah telah direalisasikan anggaran sebesar Rp152.716.480.940,- atau sebesar 69,07% yang dimanfaatkan untuk mendukung program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, sedangkan realisasi anggaran per sumber dana rupiah murni merupakan sumber dana yang realisasi tertinggi yaitu sebesar 68,85% dari Pagu Anggaran sebesar Rp252. 800, 10, 8 juta 406.000, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan realisasi sebesar 20,40%, rendahnya serapan PNBP dikarenakan bergesernya jadwal pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan akibat adanya PPKM.

Adapun isu-isu aktual diantaranya, pada tahun 2021 ini pelaksanaan peribadat Umat Buddha di masa pandemi disesuaikan dengan Surat Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bantuan Penyelenggaraan Puja Bakti atau Sembayang dan Darmasanti Waisak 2565 Tahun *Budhist* 2021 di masa pandemi, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tentang Peribadatan Yang Memenuhi Standar Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah. Lalu peningkatan layanan keagamaan yang adil dan merata menjadi point yang selalu menjadi hal utama bagi pelaksanaan program-program pada jajaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Para Pimpinan yang saya hormati dan Anggota.

Demikian beberapa penjelasan yang dapat kami sampaikan, terkait dengan evaluasi dan evaluasi program dan anggaran pada tahun 2021 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Tentu kami berharap penyampaian penjelasan ini mendapat dukungan dan persetujuan Pimpinan dan Komisi VIII DPR RI yang terhormat. Sekali lagi kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat atas perhatian dan dukungan terhadap peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Demikian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Om santi santi

Namo Buddhaya

Salam sejahtera.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya terima kasih Pak Dirjen Bimas Buddha Pak Caliadi. Selanjutnya Dirjen PHU yang disampaikan oleh Pak Plt. Dirjen Pak Khoirizi. Silakan Pak.

**Pit. DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
(KHOIRIZI):**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota DPR RI Komisi VIII yang kami hormati.

Izinkan kami menyampaikan realisasi anggaran tahun 2021. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Dirjen PHU tahun 2021 mendapat anggaran 1.593.301.172.00,- *alhamdulillah* berkat dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII kami mendapat tambahan anggaran yang cukup besar tidak kurang 122.671.230.000,- yang diperuntukan untuk revitalisasi dan pengembangan asrama haji tahun 2020, serta hibah revitalisasi masjid Al-Haji Babel. Namun demikian dalam perjalanan terjadi *refocusing* dan realokasi empat kali terdapat pengurangan sebesar 3.295.186.00 miliar dengan demikian pagu kami pada tahun 2021 sebesar 1.386.453.782.00 telah terealisasi sebesar 660.434.713.627 dengan kata lain 47,62%.

Bapak-Bapak Pimpinan yang saya hormati dan Anggota yang saya hormati.

Dari anggaran tersebut, kami alokasikan untuk paling tidak ketiga satker pertama adalah satker pusat, yang kedua adalah atase, yang ketiga kanwil. Dari tiga satker tersebut telah terealisasi 4763,63%. Sementara dari kegiatan ada empat kegiatan yang mendasar yang pertama dari rupiah murni 846.904.282.00 telah terealisasi 490.291.974.215 dengan kata lain 59% 57,97%. Berdasarkan kegiatan paling tidak ada pertama ada pembinaan umroh dan haji khusus, pelayanan haji, pembinaan haji, pengelolaan dana haji, dukungan manajemen, dan tugas teknis PHU dan pelayanan luar negeri.

Bapak-Bapak/Ibu-Ibu Pimpinan dan Anggota DPR.

Yang selanjutnya kami akan menyampaikan kegiatan yang dibiayai oleh melalui anggaran SBSN tahun 2021. Kegiatan yang dibiayai oleh SBSN tahun 2021, SBSN penanganan haji dan umroh terdiri dari dua kegiatan:

Pertama, adalah kegiatan revitalisasi dan pengembangan asrama haji, serta revitalisasi dan pembangunan pusat layanan haji dan umroh terpadu. Revitalisasi dan pengembangan asrama haji terdapat di 8 titik antara lain di Kanwil Kemenag Bangka Belitung, di Kanwil Kemenag Jawa Barat, di Kanwil Kemenag Maluku, di Kanwil Kemenag Maluku Utara, di Kanwil Kemenag Sulawesi Tenggara, UPT Asrama Haji Aceh, UPT Asrama Haji Bekasi, dan UPT Asrama Haji Lombok dengan nilai Pagu 256.631.4700. *Progres* hari ini sudah mencapai 19,7800% terealisasi baru 476.987.686.96 dengan presentase 18%.

Yang kedua revitalisasi pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu. Tahun 2021 Dirjen Penanganan Haji dan Umroh melakukan revitalisasi pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu di 42 kabupaten/kota dengan anggaran sebesar 125.885.823.0000, sampai dengan 24 September 2021 *progres* pembangunan fisik baru mencapai 49,42%

dengan realisasi anggaran 42.453.253.824 atau sebesar 33,81% dari total pagu. Adapun rincian pagu dan *progres* fisik setiap kabupaten/kota sebagaimana data terlampir.

Tiga, revitalisasi pengembangan asrama haji luncuran SBSN tahun 2020. Pada pelaksanaan revitalisasi dan pengembangan asrama haji tahun 2020 terdapat tujuh lokasi yang penyelesaian pekerjaannya melewati tahun anggaran 2020 yang lalu. Hal tersebut mengakibatkan adanya realisasi anggaran SBSN tahun 2020 dilakukan di tahun 2021. Tujuh lokasi asrama haji tersebut yaitu Asrama Haji Bengkulu, Gorontalo, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Maluku Utara.

Rincian alokasi haji, asrama haji, alokasi pagu dan *progres* fisik revitalisasi dan pembangunan asrama haji luncuran SBSN 2020 dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tujuh lokasi lima diantaranya sudah dapat menyelesaikan dengan 100% tetapi dua diantaranya Bengkulu dan Sumatera Barat, Bengkulu dan Sulawesi Tenggara masih dalam proses penyelesaian. Dari tujuh revitalisasi pembangunan asrama haji SBSN 2020 yang diluncurkan ke tahun 2021 lima lokasi sudah selesai yaitu Asrama Haji Gorontalo, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Maluku Utara *progres* fisik sudah mencapai 100%.

Dari kelima asrama haji yang sudah selesai ada dua asrama haji yang realisasi keuangannya belum mencapai 100% yaitu Asrama Haji Sulawesi Utara dan Asrama Haji Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan perbedaan pemahaman terhadap syarat pembayaran antara PPK dengan penyedia. Selanjutnya masih terdapat asrama haji yang pembangunannya belum selesai, karena sempat terjadi pemutusan kontrak yaitu Asrama Haji Bengkulu dan Asrama Haji Sulawesi Tenggara. Hasil monitoring kami Pak Pimpinan dan Anggota *alhamdulillah* sudah banyak perkembangan Insya Allah bisa mencapai target yang kita harapkan.

Isu-isu aktual:

Pertama, dampak KMA 66.660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan haji tahun 2021, berdampak kepada pro kontra di masyarakat, namun demikian berkat dukungan semua pihak dan kerja sama semua pihak *alhamdulillah* pro kontra itu lambat laun semakin mereda dan hari ini kita sudah dapat melihat masyarakat sudah dapat menerima sebagaimana yang kita putuskan bersama.

Yang kedua, penyelenggaraan haji penyelenggaraan umroh tahun 1443 sampai saat ini belum ada regulasi teknis dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi secara resmi kepada Pemerintah Indonesia. Adapun regulasi yang telah beredar regulasi nomor 421, 124, 038 sebatas untuk *stakeholder* penyelenggaraan umroh di tanah Arab atau di tanah suci di Arab Saudi yang dibatasi untuk warga negara dan mukimin serta *expatriate* yang memiliki igoma. Dari edaran tersebut kami menarik tiga isu yang mendasar pertama isu suspend, yang kedua isue vaksin, yang ketiga tentang isue protokol. *Alhamdulillah* dua isue sudah kita mitigasi dan sudah mendapat

perkembangan, dimana *suspend* Pemerintah Arab Saudi sudah membuka 9 negara yang ter-suspend satu diantaranya Indonesia, namun masih sebatas untuk mukimin dan expatriate yang memiliki egoma.

Mengenai vaksin *alhamdulillah* mendapat informasi dari Kementerian Kesehatan, kami sudah mendapat informasi bahwa vaksin sinovac sudah mendapat legalisasi dari WHO, namun sampai saat ini Pemerintah Arab Saudi terus mengkaji. Atas keberadaan vaksin sinovac tersebut untuk bisa dijadikan atau landasan di dalam penyelenggaraan umroh yang akan datang. Maka dengan demikian Bapak Pimpinan dan Anggota, protokol covid bila umroh dilaksanakan Insya Allah bisa dilaksanakan dalam regulasi dan teknis yang secara khusus diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Langkah-langkah yang kami lakukan adalah koordinasi kepada seluruh *stakeholder* kami di dalam penyelenggaraan umroh, yang kedua memberikan relaksasi terhadap penyelenggaraan umroh paling tidak memberikan perpanjangan masa akreditasi selama masa covid, yang ketiga melanjutkan memperbaiki regulasi-regulasi umroh sesuai dengan kondisi covid yang sedang berjalan. Demikian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Pak Khairizi tetap semangat Pak Khairizi. Selanjutnya Inspektur Jenderal Pak Deni Suhardini dipersilakan, Pak.

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA (DENI SUHARDINI):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Syalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam kebajikan.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pratama yang hadir saat ini.

Izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan perhatian terhadap upaya peningkatan kinerja di Kementerian Agama khususnya di masa pandemi Covid-19 saat ini yang telah menyebabkan perubahan

lingkungan strategis yang penuh ketidak pastian penuh dinamis, penuh beragam dan penuh ambiguitas.

Izinkan kami menyampaikan pertanggung jawaban dalam dua hal:

Pertama akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas keuangan seperti disajikan dihalaman 9 bahwa Irjen telah mencapai realisasi keuangan per 24 September sebesar 66% yaitu realisasi sebesar Rp100.357.232.000,- dari total anggaran setelah *refocusing* empat kali sebesar Rp152.061.469.000,-. Masing-masing rincian berdasarkan jenis belanja kegiatan fungsi, kami sajikan ditabel 3, 4, 9, dan 5 dihalaman 9. Kemudian dari sisi akuntabilitas kinerja kami memiliki tiga sasaran program yang di dukung dengan 14 indikator kinerja, dimana dari 14 indikator kinerja yang sudah memenuhi target sebanyak 7 indikator, kemudian 2 masih dibawah target, dan 5 belum bisa disajikan karena masih dalam proses pelaksanaan pengawasan intern. Dan kami sajikan secara rinci di dalam tabel VII halaman 10, 11, dan 12.

Kemudian juga isu penting yang menjadi perhatian kami, sebagai agenda prioritas pengawasan dengan merujuk kepada kebijakan pengawasan inti yaitu pengawasan untuk kesejahteraan rakyat dan kebijakan fokus yang diutamakan terhadap pengawasan internal untuk pencegahan korupsi, kemudian juga pengawasan internal untuk mengawal program-program strategis nasional yang menjadi *leading sector* Kementerian Agama, pengawasan internal yang terkait dengan peningkatan kapasitas fiskal, baik belanja maupun pendapatan negara dan juga pengamanan aset negara dan juga pengawasan yang menyangkut peningkatan tata kelola yang baik, peningkatan manajemen resiko yang efektif, dan kehandalan pengendalian *intern*.

Kendala-kendala yang kami hadapi adalah masih adanya *refocusing* anggaran, kemudian juga adanya kebijakan pandemi Covid-19 PPKM dan tentu upaya-upaya ini kami akan selalu memberikan mencari solusinya dengan tetap melakukan *monitoring* terhadap akuntabilitas keuangan menyangkut realisasi keuangan dari sisi kuantitas penyerapannya dan juga dari sisi kualitas penyerapannya kita selalu berpegang teguh pada indikator kinerja pengelolaan anggaran.

Dan tentu kami melakukan monitoring secara berkala terhadap rencana penarikan dana untuk bulan Oktober, November, Desember sehingga sedini mungkin kita sudah melakukan peta mana yang kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga potensi *real* dari pada realisasi anggaran bisa diputuskan atau diberikan langkah deteksi dini untuk dialokasikan kegiatan lain melalui revisi POK dan sebagainya, sehingga potensi realisasi anggaran bisa betul-betul dikendalikan dan sisa anggaran betul-betul juga bisa kita pantau, sehingga nantinya tidak terdapat sisa anggaran yang tinggi.

Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi sebagai penutup kami senantiasa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bimbingan dan arahan dari Bapak-

Bapak yang kami muliakan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI.
Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Om santi santi santi om.

KETUA RAPAT:

Iya terima kasih Pak Deni, Pak Irjen yang sudah memaparkan dengan singkat tapi padat. Selanjutnya sebagaimana tadi kita sepakati bahwa kita akan selesai jam 12.30. Namun masih ada dua sisa, jadi saya minta izin kepada para Anggota kita akan perpanjang untuk menyelesaikan presentasi dulu, setelah itu kita skors untuk sholat, makan ya bangsa 60 menit gitu ya setelah itu nanti kita lanjutkan tanya jawab itu ya.

Jadi karena itu saya perpanjang 10 menit untuk presentasi Pak Kabalitbang sama BPJPH. Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Silakan Pak Kepala Badan Litbang Diklat.

KEPALA DIKLAT LITBANG (Prof. ACHMAD GUNARYO):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati Pak Ketua Bapak/Ibu Pimpinan, serta Anggota Komisi VIII DPR RI yang semuanya saya hormati.

Izin menyampaikan paparan evaluasi program dan anggaran tahun 2021 serta isu-isu aktual yang ada di Balitbang Diklat.

Ibu dan Bapak yang saya hormati.

Sebagaimana yang tertera di dalam laporan kami litbang diklat memiliki anggaran sebesar 693.143.361.000 sebagaimana yang lainnya kami juga mengalami *refocusing* empat kali. Dari anggaran itu setelah dilakukan *refocusing* empat kali menjadi 604.993.526.000 alias ada pengurangan sebanyak 88.149.835.000. Sampai saat ini kami memiliki serapan anggaran sebanyak 63,73% sebagaimana yang terdapat pada tabel II, III, dan IV yang di dasarkan pada fungsi, di dasarkan pada jenis belanja, dan kewenangan.

Bapak/Ibu yang saya hormati.

Nah kebijakan *refocusing* dan alokasi belanja 2021 ini memberikan dampak pada pencapaian volume keluaran pada beberapa rincian *output* yang telah ditargetkan. Namun demikian kami berusaha semaksimal mungkin bahwa *refocusing* ini tidak begitu berdampak berat pada pelaksanaan tugas-tugas kami, diantaranya adalah memaksimalkan kemampuan IT yang ada pada kami sehingga pelaksanaan-pelaksanaan tugas-tugas itu bisa dilaksanakan dengan baik meskipun tetap saja ada perbedaan antara *offline* dan *online*. Nah

Ibu dan Bapak yang saya hormati.

Refocusing juga dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas pada tahun 2021 yang saat itu belum teranggarkan pada DIPA 2021. Kegiatan prioritas itu antara lain penguatan moderasi beragama, penerapan indeks beragama, religius city indeks. Rincian kegiatan prioritas sebagaimana ada pada tabel 6 yang seluruhnya berjumlah Rp16.923.145.000,- Badan Litbang dan Diklat juga melakukan realokasi anggaran untuk pelaksanaan latsar CPNS 2021 sebanyak 5.179 orang. Nah kami laksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2001, dimana setiap calon pegawai negeri sipil itu dianggarkan sebanyak Rp5.260.000.000,- per orang, sehingga seluruhnya anggarannya adalah sebanyak Rp27.241.541.000,-

Nah untuk itu, maka kami ambilkan dari seluruh BDK yang ada di Indonesia yaitu berjumlah 14, sehingga kebutuhan untuk latsar itu bisa terpenuhi. Kemudian capaian program untuk 2021 sebagaimana bisa disaksikan pada tabel VIII melaksanakan kegiatan mendukung prioritas nasional revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan program prioritas memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial berikut capaian keluaran sebagaimana bisa kita lihat pada tabel VIII.

Kami tentu saja sama seperti yang lain memiliki kendala Ibu dan Bapak, nah kendalanya adalah harus diakui bahwa meskipun Covid-19 ini merupakan sebuah kesempatan tetapi juga itu merupakan tantangan pula dan itu sampai hari ini masih menjadi tantangan, karena itu maka kami memasukkannya menjadi suatu kendala juga, kemudian masih dalam proses penyelesaian anggaran pada masing-masing pengelola keuangan sampai hari ini mudah-mudahan cepat selesai dan artinya masih di dalam sebuah proses. Kemudian yang ketiga terdapat beberapa pembayaran belanja modal yang direalisasikan di akhir termin terutama penelitian-penelitian itu kalau tidak jadi ya tidak dibayar harus jadi dulu baru dibayar dan saat sekarang itu banyak yang belum selesai.

Menyikapi hal tersebut itulah, maka kami melakukan merealisasikan alokasi belanja modal dimana sampai saat ini tingkat penyerapannya masih diakui masih sebelum sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian melaksanakan kegiatan secara paralel, kegiatan *offline* dan *online* *blandidlening* yaitu kombinasi antara *offline* *online*, tidak merubah jadwal dan lokasi kegiatan yang telah ditetapkan, kemudian melakukan revisi anggaran hanya untuk belanja kegiatan prioritas dan mendesak, melakukan *monitoring*

serapan fisik dan anggaran secara berkala, serta penanggung jawab kegiatan melakukan penjadwalan ulang semua kegiatan dan pelaksanaan anggaran menyesuaikan regulasi penanganan pandemi.

Isu-isu aktual yang ada pada litbang diklat adalah nomor satu ini adalah beralihnya Litbang kementerian/lembaga ke BRIN, dimana seluruh peneliti dan peneliti pembantu itu akan pindah semuanya tidak ada di Kementerian Agama ini, mudah-mudahan akhir tahun ini sudah selesai dan mudah-mudahan pula anggaran penelitian juga tidak diambil karena Bappenas mengatakan konon katanya diambil, karena itulah saya mohon supaya SOTK-nya segera selesai sehingga tetap bisa dilaksanakan untuk hal yang lain.

Untuk kegiatan moderasi beragama banyak sekali yang kami lakukan Ibu dan Bapak, ini yang sekali lagi ada dalam rangka untuk mencapai penyelesaian isu-isu aktual yang saat sekarang ini sedang ada disekitar kita. Kemudian kita juga telah mendapat persetujuan berdirinya dua satuan kerja lokal diklat yaitu Lampung dan Riau. Saya rasa Lampung ini sudah siap untuk *running* sedangkan Riau ternyata bangunannya meskipun baru bebas beberapa bulan yang lalu di duduki oleh Polri, saat sekarang hampir semua atapnya dicuri orang sehingga tidak bisa dipakai untuk pelaksanaan kegiatan ini sehingga perlu untuk dihitung kembali anggaran berikutnya.

Kemudian yang keempat adalah Jabatan Fungsional Pengembang Tafsir Al-quran pada MPNQ yang saat sekarang ini masih baru, sehingga perlu untuk dilakukan kordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga ini bisa *running* segera, kemudian juga dilakukan proses penetapan jabatan fungsional pengembang al-quran yang saat sekarang juga sedang berlangsung di tahap uji beban kerja.

Saya kira demikian Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Komisi VIII yang saya sampaikan. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Prof. Achmad Gunaryo.

Selanjutnya yang terakhir dari BPJPH Plt. Kepala BPJPH Pak Mastuki silakan, Pak.

Plt. KEPALA BPJPH (MASTUKI):

Baik terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VIII Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, dan Seluruh Anggota Komisi VIII yang saya hormati.

Izinkan kami BPJPH menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelaksanaan RDP kal ini dan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan selalu memohon untuk mendapatkan dukungan dari Pimpinan dan Komisi VIII DPR RI.

Langsung kami sampaikan bahwa Pagu BPJPH tahun 2021 sebesar 97.497.916.000, namun setelah terjadi beberapa kali *refocusing* sebesar 14.332.381.000 terakhir Pagu Anggaran yang tersedia adalah 83.164.935.000. Per hari ini realisasi anggaran berdasarkan pada sumber dana baru mencapai 34,80% dengan rincian rupiah murni 74.325.259.000 dengan realisasi 28.940.221.000. Berdasarkan pada fungsi sebagaimana ada dalam tabel, kemudian berdasarkan pada program karena terbanyak pada program kerukunan umat beragama baru terealisasi 4,36% dan dukungan manajemen 48,50%.

Kemudian realisasi pada berdasarkan pada kegiatan, dimana ada tiga pusat dan satu Sekretariat. Di pusat registrasi dan sertifikasi halal dari pagu yang tersedia 22.339.676.000 baru terealisasi 1.080.750.000 atau 4,84%, ini dikarenakan karena 12 miliar *plus* 8,8 miliar yaitu dari dana BLU itu tersedia untuk anggaran bantuan kepada pelaku usaha yang realisasinya akan dilakukan melalui program sertifikasi halal gratis.

Kemudian untuk pembinaan dan pengawasan baru terealisasi 33,38% atau 1,2 miliar sekian, pusat kerja sama dan standarisasi 26,38%, dan dukungan manajemen atau di Sekretariat sudah terealisasi 25.313.377.000 dari 52.196.824.000 atau 48,50%.

Kami yakin bahwa dalam sisa waktu yang tersedia kurang lebih tiga bulan kedepan, kami dapat menyelesaikan sisa anggaran ini dengan melihat ada beberapa potensi dan kendala-kendala yang dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Meski ada kendala perubahan-perubahan di dalam regulasi jaminan produk halal terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 ada sejumlah Rancangan Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Menteri Agama, serta beberapa peraturan yang lebih teknikal yaitu di Peraturan Kepala BPJPH. Sampai saat ini masih ada 8 Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Menteri Agama yang sedang dalam proses penyelesaian dan harmonisasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Perlu kami sampaikan bahwa percepatan pembahasan dengan Biro Hukum dan juga melibatkan beberapa kementerian/lembaga terkait sudah kami laksanakan, begitu juga untuk *legal drafting* sudah kami lakukan karena beberapa konsep-konsep yang ada sudah disediakan, namun masih ada kendala untuk penyusunan untuk mempercepat penyelesaian dari sejumlah peraturan dan atau Keputusan Menteri Agama ini.

2. Kemudian yang kedua seluruh kegiatan yang ada di pusat demikian berdampak karena turunan dari PP 39 ini mengharuskan ada beberapa

penyesuaian dan dalam pelaksanaan realisasinya terhambat. Kemudian sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa ada anggaran sebesar 8.839.676.000 yang ini diprediksikan bersumber dari BLU belum bisa direalisasikan, karena belum ada pendapatan yang diperoleh dari pelaksanaan jaminan produk halal.

3. Kendala yang utama adalah karena peraturan teknis untuk pengenaan tarif layanan BPJPH baik untuk sertifikasi, registrasi, maupun akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal itu belum selesai dilaksanakan.
4. Kemudian ada anggaran program sertifikasi halal gratis yang digunakan khusus untuk UMK, *launching* dilaksanakan tanggal 8 September 2021 oleh Menteri Agama dan saat ini sedang dalam proses penjaringan pelaku usaha. Data terakhir per hari ini sudah ada 687 pelaku usaha yang sudah mendaftar dan sudah diverifikasi atau *verified* dan selanjutnya saat ini bimbingan teknis secara masif dilaksanakan bersama Lembaga-Lembaga Pembina dan Kementerian/Lembaga terkait dilaksanakan berdasarkan zona-zona tertentu dan juga kepada kebutuhan-kebutuhan Kementerian/Lembaga atau Lembaga pembina terkait. Karena itu dukungan dari dinas-dinas dan assosiasi secara masif dilakukan. Mudah-mudahan pelaksanaan sertifikasi halal gratis ini atau program Sehati ini bisa mempercepat realisasi anggaran yang tadi kami sampaikan masih terbilang cukup besar yaitu 12 miliar.
5. Kendala yang kami hadapi ada anggaran 5 miliar dari realokasi yang terjadi di BPJPH saat ini masih proses buka blokir dan pada tanggal 9 September 2021 kami mendapatkan informasi untuk *clearance* dari Kementerian Kominfo karena anggaran ini terkait dengan perawatan dan aplikasi sistem informasi halal.

Kemudian beberapa barang yang kami butuhkan juga belum tersedia di e-katalog di LKPP untuk dukungan terhadap sistem informasi halal dan karena itu anggaran belum juga bisa direalisasikan. Kami mengestimasi bahwa jika diakhir September barang-barang tersebut belum tayang di e-katalog, LKPP maka bulan Oktober akan kami ambil inisiatif untuk pengadaan lain melalui tender cepat dan beberapa kondisi yang terkait dengan masa Covid-19.

Berdasarkan pada kondisi yang kami sebutkan tadi ada beberapa isu aktual yang saling terkait; pertama program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) ini kami akan lakukan secara masif untuk 3.200 UMK yang menjadi sasaran dan juga ditambah dengan pelaksanaan *self-declare* yang akan dilaksanakan secara beriringan pada awal bulan Oktober. Sampai dengan hari ini kondisi pelaku usaha yang telah mendaftar sudah dijalankan kalau tercantum disini 272 UMK tapi hari ini terjadi lonjakan 658 UMK yang sudah terdaftar.

Kemudian bersamaan dengan itu untuk mempercepat pelaksanaan program sertifikat halal khususnya bagi UMK, pengembangan si halal sangat kami sedang laksanakan khususnya juga untuk menyiapkan pernyataan

pelaku usaha atau *self-declare* ya dan proses pendampingan PPH yaitu proses produk halal yang sudah kami laksanakan kordinasinya dengan sejumlah ormas dan perguruan tinggi ada Nadlatul Ulama, muhammadiyah, kemudian sejumlah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Dengan begitu target sertifikasi halal gratis bisa dilaksanakan secara masif. Yang ketiga yang juga berkaitan adalah rekrutmen dan pelatihan pendamping PPH, ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak karena terkait dengan pelaksanaan sertifikasi halal gratis khususnya melalui jalur pernyataan atau *self-declare*.

Demikian isu-isu aktual yang dapat kami sampaikan, sekali lagi terima kasih mudah-mudahan dengan evaluasi kinerja dan program BPJPH tahun ini serta isu-isu aktual yang kami sampaikan seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang terhormat bimbingan dan sekaligus dukungan kepada kami.

*Wallahul Muafiq Ila Aqwamith Thariq.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Mastuki.

Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi kita skors dulu ya sampai pukul 13.30 ya untuk sholat dan makan siang, setelah itu akan kita lanjutkan dengan tanya jawab dan tanggapan, serta kesimpulan.

Sekali lagi, demikian rapat kita skors sampai pukul 13.30.

(RAPAT DISKORS PUKUL:12.30)

Anggaran tahun 2021 untuk Kementerian Agama, oleh karena itu atas persetujuan Anggota dan Bapak/Ibu sekalian skors saya cabut.

(SKORSING RAPAT DICABUT PUKUL:13.45)

Dan kita menyepakati kita bisa selesaikan sampai pukul 15.00 ya?

(RAPAT:SETUJU)

Oke

Bapak/Ibu sekalian.

Kita langsung, Pak Sekjen izin kita mulai saja ya, Pak Dirjen untuk mempersingkat waktu, pertama kali saya akan persilakan kepada Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pak Samsu Niang dipersilakan.

F- PDI PERJUANGAN (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd.):

Sebentar saja, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati Pimpinan Komisi beserta seluruh.
Pak Sekjen beserta seluruh Dirjen yang hadir pada hari ini.

Jadi intinya Pak Ketua ini buku yang banyak sekali ini kita sudah berapa kali membahas dan kita sudah tahu isinya, karena ini realisasi anggaran 2021. Jadi tinggal tiga bulan. Jadi cuma harapan kita mudah-mudahan yang tiga bulan kedepan ini bisa lebih progresif lagi untuk menyelesaikan sampai 100%. Nah itu saja yang ingin saya sampaikan.

Kemudian yang kedua, ada aspirasi di Dapil saya Pak Dirjen ada MTS DDI Panincung, Kabupaten Sopeng itu kena puting beliung jadi 3 RKB rusak, kemudian MTS Asadia kena banjir 2 RKB rusak di Sopeng semua, Pak, itu saja barangkali karena apa yang mau dibahas sudah selesai ini, Pak. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Memang Pak Samsu Niang mengawalinya dengan baik, Pak. Selanjutnya dari Golkar Bu Endang, silakan Bu Endang.

F- P. GOLKAR (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., SH., MH.):

Terima kasih

Pimpinan dan rekan-rekan Komisi VIII yang cintai dan saya banggakan,
Pak Sekjen, Pak Dirjen, serta seluruh Eselon yang berkesempatan hadir.

Sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Samsu Niang sebetulnya kita sudah tahu, apalagi ini sudah dibahas tidak hanya sekali. Hanya saja ada beberapa catatan Pak Sekjen, Pak Dirjen, karena ada beberapa point serapan anggarannya yang belum begitu memuaskan. Kita berharap bahwa ada percepatan jika ke depan kita ke depan ingin anggaran kita dinaikan tentunya pasti akan dilihat dari serapannya. Nah kita berharap untuk ada beberapa misalnya yang paling rendah serapannya adalah BPJPH. Pak kita berharap program sertifikasi halal bisa dong kolaborasi dengan Komisi VIII untuk memberikan sosialisasi percepatan pada UMKM sertifikasi halal ini saya kira, ini saya kira akan jauh lebih cepat. Kita punya banyak juga binaan UMKM yang ini menjadi momen terpenting untuk percepatan Bapak. Jadi ke

depan itu kita akan jauh lebih enak jika akan memprogramkan bagaimana ke depan biar lebih baik, termasuk untuk teknologi dan pendamping, pendampingnya gitu kan.

Kemudian kalau untuk PHU, saya kira ada dua, dua yang ini ya, Pak, apa kinerjanya kurang tidak memuaskan bukan kurang. Karena apa? Mungkin di pandemi dan sebagainya ini mungkin perlu di push segera agar supaya juga penyerapannya menjadi lebih baik. Termasuk untuk layanan haji umroh terpadu ini menjadi pemikiran tersendiri melihat kondisi jamaah ke depan itu semakin lama tidak semakin menyusut, jadi perlu pembinaan sebagaimana cita-cita yang ada di Undang-Undang untuk jamaah yang lebih mandiri. Ini harus tentu mewujudkan PLTHU itu tadi.

Kemudian untuk Dirjen Bimas Islam ini, tadi saya melihat itu kan yang keluarga sakinah karena kendalanya. Tetapi ada generasi muda di era pandemi, ini harus mendapatkan pembinaan secara intensif dan masif saya kira Pak Dirjen, agar supaya mereka tidak hamil duluan, tidak punya anak di luar nikah ini menjadi penting. Dan ketika ini desiminasi bersama Komisi VIII saya kira sangat luar biasa karena kata kunci akhlak dan pribadi atau apa namanya akhlak di masyarakat kan tergantung dari sini dan ketika ini kita sampaikan bersama anak-anak, kita ingin membenahi agar supaya menjadi lebih baik. Nah porsi inilah yang mestinya di *push*, Pak, gitu besar harapan kami demikian.

Termasuk juga untuk pembinaan karena moderasi umat beragama tentunya melibatkan majelis ta'lim yang lebih banyak. Anggaran Bapak untuk majelis ta'lim ini perlu ditingkatkan, sehingga ke depan kita berharap tidak ada lagi itu yang namanya label, apa namanya label yang apa itu, Pak, yang bom bunuh diri dan sebagainya ini sudah tidak ada lagi, harapan kita ada di, disitu gitu pembinaannya.

Kemudian untuk apa Dirjen Pendis, tadi memang ada yang disampaikan untuk apa ini berkurangnya, berkurangnya jabatannya disetarakan dari 13 ribu sekian menjadi ini. Ini apakah mempengaruhi atau tidak kinerja mereka? Jika memang ini sangat berpengaruh ke depan kan harus ada solusi bersama Komisi VIII, agar supaya ini minimal ada peningkatan. Kemudian apa namanya, akreditasi, Pak, yang menjadi kendala saat ini dibanyak sekolahan apakah itu sekolahan negeri, swasta, perguruan tinggi negeri swasta, karena akreditasi ini justru membuat sibuk guru, dosen tentang administrasi, konsentrasi mereka mengajar ini menjadi berkurang. Kita khawatir ini akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia.

Ini perlu menjadi pemikiran tersendiri bagi Pak Dirjen saya kira, untuk akreditasi saya minta tolong dicarikan solusi terbaik. Saya yakin akreditasi standar diperlukan tetapi bagaimana ini akreditasi tidak menghabiskan waktu, guru, dan dosen ini menjadi penting, kasihan anak didik kita gitu ya ke depan karena gurunya nampaknya kualitas tapi kualitas untuk administrasi, tetapi dari sisi apa namanya apa siswa agar supaya mempunyai kemampuan yang baik di segala bidang ini menjadi berkurang.

Nah kita berharap titiknya adalah yang namanya pendidikan keagamaan khususnya kalau Bapak kependidikan agama Islam kita berharap pendidikan agama Islam mempunyai nilai *plus-plus* dan yang kedua mengenai pendidikan agama Islam kenapa anak-anak didik kita di sekolah-sekolah negeri ini menjadi kualitas apa karakternya berkurang? Karena pendidikan agamanya hanya dua jam, sehingga mereka mencari, mencari jati dirinya melalui ya mungkin kajian-kajian menjadi kajian yang justru mengkhawatirkan, ini perlu menjadi pemikiran tersendiri jadi PR-nya saya kira itu.

Jadi peningkatan kompetensi ke depan untuk penyuluh agama ini ya untuk peningkatan kualifikasi saya kira peningkatan kompetensi kualifikasi penyuluh agama Pak, kembali ke Pak Dirjen Bimas, saya kira akan bagus ketika memang sudah direncanakan kita turun bersama-sama sehingga Komisi VIII itu bisa memotret langsung apa si nanti masukan, kendala atau ke depan yang terbaik di dalam melakukan pembinaan, jadi *win-win solution* untuk ke depan itu akan jauh lebih baik.

Saya kira seperti itu, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Selanjutnya dari Gerindra yang hadir. Gerindra, yang hadir di virtual ada? Oke selanjutnya saya lanjutkan ke Nasdem Pak Rudi ya. Silakan Pak Rudi.

F- P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Ketua dan seluruh Anggota.
Yang saya hormati Pak Sekjen, Dirjen, dan jajaran.

Pertama Pak Ketua, saya ingin menyampaikan sedikit masukan tentang acara rapat kita pada hari ini. Kita rapat pada hari ini dihadiri oleh Sekjen dan 11 Dirjen. Saya melihat kurang efektif, Pak, kalau kita hari ini seperti kejar tayang gitu. Saya ingin menyampaikan baiknya apakah biasa dibagi dua *session* atau tiga *session* jadi kita lebih santai dan tenang membahasnya gitu. Karena kalau ini kan anggaran uang rakyat triliunan masa kita ngejar tayang hanya dua tiga jam. Saya itu masukan saya dan saya kira kurang pas Pimpinan, itu yang pertama.

Yang kedua, mengenai anggaran disetiap Dirjen, Pak Sekjen. Saya melihat seluruh judulnya ini program dan Dirjen Bimbingan, Dirjen Bimas Kristen, Bimas Islam, Hindu, semua Bimas, Pak, artinya kan ada bimbingan

masyarakat, tapi yang saya rasakan yang bimbingan itu ada di PHU itu, Pak, gitu yang programnya kami rasakan Anggota semua pernah rasakan. Di Dirjen yang lain yang Bimas mereka tidak pernah kami turun dan merasakan, nggak tahu itu yang lain-lain, Pak. Jadi dari sekian triliun kami tidak bisa membimbing turun di masyarakat, untuk apa kami disini, Pak, untuk apa kita rapat gitu.

Harusnya ini sesuaikan program bimbingan Dirjen, apa Dirjen Islam. Kami harus ketemu masyarakat Hindu Indonesia, Pak, masyarakat Islam Indonesia, masyarakat Kristen Indonesia program Bapak triliunan gitu. Ayo ketemukan program haji, sudah diketemukan sama Dirjennya kami, Pak, tapi yang lain tidak ada, Pak, nah itu. Jadi saya, saya lihat ini rapat ecek-ecek yang Dirjen lain, Pak, main-main ini gitu. Jadi coba Bapak pikir serius nggak ini rapat ini gitu. Kalau cuma hanya lip service, Pak, ya saya pikir nggak usah rapat gitu, Pak, kalau bisa disahkan, sahkan saja sendiri gitu. Tanggung jawab sendiri, dilapor ke Kemenkeu tanggung sendiri kan gitu.

Nah itu yang saya ingin ingatkan, Pak, karena ini kami bicara dalam konteks, Pak, wakil rakyat, pak, Bapak dalam konteks eksekutif, kami legislatif jadi berbeda gitu. Tadi yang Bapak paparkan di ruangan Pimpinan dan Komisi ya sudah bagus, tapi kami nunggu realisasinya, Pak, rakyat itu nunggu realisasi nggak nunggu apa-apa. Kalau kami hanya bisa menyaksikan, Pak, punya nama baik tidak dianggap pembohong dan penipu gitu, karena wakil rakyat itu ya itu amanah saja, Pak, gitu. Jadi ingin saya ingatkan sekali lagi tolong, Pak, Dirjen-Dirjen ini Pak Sekjen. Saya komunikasi yang bisa di iyaikan itu Pak Sekjen Mas Iyan, lain tidak ada, Pak. Pak Dirjen-Dirjen yang Kristen ini pernah saya kontak, saya ajak ketemu tokoh masyarakat Kristen sudah ketemu, sudah dijadwal, ditelepon Dirjen Kristennya nggak mau angkat saya dibilang penipu, Pak, padahal mereka sudah janjikan ketemu acaranya gitu.

Nah itu sangat-sangat memalukan, Pak, gitu sementara saya ini wakil rakyat, rakyat sudah berharap oh betul ini bakal di datangkan orang dari Kementerian. Jadi hal seperti itu tolong, Pak, jadi perhatian kalau Bapak memang nggak serius ya saya juga nggak serius asal-asalan. Semua nanti laporan Bapak ini saya lempar-lempar ke LSM, sama wartawan, sama aparat gitu para dokumen supaya banyak yang memantau Bapak begitu akhirnya. Jadi kita harus sama-sama, Pak, kerja sama jangan Bapak sendiri, jangan Bapak pura-pura tidak tahu atau apa pun gitu. Saya ingin ingatkan itu saja, Pak, kalau yang lain-lain Bapak sudah pengalamanlah itu, ilmunya sudah profesor doktor gitu. Saya pikir itu saja yang utama, Pak, niat Bapak itu niat nggak? Kami dari sisi aspirasi wakil rakyat saja gitu, terima kasih, terima kasih Pak Sekjen, terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya dari PKB Pak Huda, silakan Pak Huda.

F-PKB (MF. NURHUDA Y):

Iya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih

Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Komisi VIII yang saya hormati.
Bapak/Ibu dari Eselon I dari Sekjen dan para Dirjen dan Pak Irjen yang saya hormati dan segenap jajarannya,

Saya setuju sekali dengan untuk mendorong agar segera direalisasikan masih ada tiga bulan, karena rata-rata kalau kita ambil presentase apa namanya penyerapan itu antara 60 sampai 70% jadi masih ada waktu tiga bulan itu mohon untuk segera direalisasikan.

Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada kendala-kendala pemblokiran dana dari Kementerian Keuangan itu agar segera dilakukan *lobby* secara intensif karena memang biasanya *lobby* disana itu kan biasanya dihadapkan pada Eselon IV, Eselon III gitu ya jadi kadang-kadang Dirjen berhadapan dengan Dirjen yang Di Kementerian berhadapan dengan Eselon III, Eselon IV. Nah itu diharap agar bisa *lobby* yang lebih tinggi lagi.

Kemudian yang ketiga, saya tadi menyambut baik membaca di halaman 20 dari Dirjen Pendis ya soal PPPK, betul pendis, Pak ya, yang membuka formasi sebanyak 27.303 bagi guru agama honorer. Jadi dari Fraksi PKB sebenarnya mengharapkan, Pak, ini kan kalau sebanyak ini memang bagus tapi untuk satker negeri, Pak, tapi yang di satker swasta itu mohon diperhatikan betul, karena memang di madrasah itu 90% hampir 90% itu guru yang di madrasah disatker swasta, sementara kalau di Dikbud itu kan 90%-nya di satker negeri itu mohon diperhatikan ke depan.

Kemudian yang keempat, kami harap ada evaluasi menyeluruh dari proses pengalaman pengajuan program di Kemenag ini karena saat ini kan berbasis *online*, sementara apa tidak seluruh masyarakat bisa menjangkau karena signal itu tidak seluruhnya bisa mengakses dengan baik. belum lagi seringkali beberapa daerah melaporkan kepada kami bahwa ada maintenance pada saat mereka menjangkau online jadi mohon itu diperhatikan.

Kemudian yang terakhir, soal dana abadi pesantren kami mengapresiasi dari apa Kemenag saya kira punya andil besar dalam melakukan loby kepada Presiden untuk segera menandatangani Perpres dan ini sebagai apa sebagai implementasi dari Undang-Undang Pesantren yang akan melakukan *recognize*, kemudian fasilitasi, dan afirmasi kepada

pesantren. Fraksi PKB menyambut baik bahwa ini sebagai kado istimewa dari hari santri pada 22 Oktober 2021 ini. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Huda dari PKB. Selanjutnya dari Demokrat Pak Achmad, silakan Pak Achmad.

F- P. DEMOKRAT (Drs. H. ACHMAD, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan beserta Anggota Komisi VIII yang kami hormati.
Pak Sekjen beserta seluruh pejabat Eselon I, Pak irjen dan Kepala Badan, serta produk halal.

Pertama, kami mendukung apa yang disampaikan rekan dari Fraksi Nasdem Pak Rudi tentang jadwal pembahasan dari pada evaluasi anggaran 2021 Kementerian ini. Jadi ini kan 11, Pak, 11 pejabat Eselon I, yang dananya cukup besar 69 triliun. Nah dengan alokasi waktu kita lebih kurang 3-4 jam. Nah ini kan dari sisi waktu jauh dari mencukupi, dari segi pendalaman jauh dari pada maksud dan tujuannya sehingga evaluasi ini terkesan hanya sekedar memenuhi jadwal kita saja. Gugur kewajiban kami sebagai Anggota DPR, gugur kewajiban Bapak menyampaikan pada DPR.

Nah kami, Pak, saya Bupati, Pak, 10 tahun hanya 1,2 triliun anggaran kami. Pendalaman seperti ini sampai tiga hari tiga malam mendetail, Pak, seperti itu Pak Pimpinan. Jadi kedepan ini saran kami kalau ada evaluasi ini jangan diborong keliling 11 gitu termasuk dalam pembahasan. Jadi disesuaikan kemampuan daya pikir kita ini, ketahanan kita untuk berpikir dan berbicara dengan alokasi Dirjen atau mitra yang akan kita bahas. Misalnya dari 11 itu tiga tahap, Pak, sehingga betul-betul mendalam, apa yang disampaikan para Dirjen salah satu kita memahami, karena apa Pak Ketua, karena ini program mereka ini menyentuh langsung kehidupan masyarakat kita, langsung dan Kementerian Agama ini termasuk lima besar anggaran APBN dari lembaga/kementerian yang ada. Jadi lima anggaran terbesar menyerap APBN ini, duanya ada di kita, yang besar itu ATR BPN dua, kedua pendidikan, ketiga kesehatan, keempat sosial, kelima Menteri Agama, dua di Komisi VIII ini, Pak.

Jadi oleh sebab itu perlu keseriusan kita dalam pembahasan pendalamannya, sehingga diharapkan betul-betul efektifitas dari pada anggaran ini tepat sasaran. Ini contohnya seperti Dirjen Pendis, ini kan baru 40,49% ya kan dari 4,3 triliun 1 koma, kita kan tidak bisa menanyakan ini,

yang 60 itu apa jenisnya itu Pak? Apakah berbentuk fisik atau bentuk apa? Nah kalau fisik tentu ada kendala ini. Waktu hanya tinggal tiga bulan Menteri Keuangan menutup anggaran itu tutup buku itu 20 Desember, Pak, jadi efektif kita hanya 2 bulan 20 hari.

Jadi ke depan ini kami kira perlu kiranya kesiapan kita membahas anggaran ini baik eksekutif, legislatif sehingga pembahasan ini betul-betul mendalam gitu. Bukan kita mempersulit tetapi kalau ada kendalanya di lapangan misalnya terutama bersifat fisik apa kendalanya, pas kita reses Oktober ini bisa kita bantu gitu maksudnya, sehingga nampak sinergifitas kita.

Karena apa? Karena pelayanannya menyangkut kepada apa namanya, kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Semakin baik kerja Kementerian ini *trust* masyarakat kepada Pemerintah semakin baik, tetapi penyerapan anggarannya semakin kecil kepercayaan masyarakat juga semakin kecil, apalagi program dari Kementerian kita ini langsung menyentuh kehidupan masyarakat jadi itu saran kami.

Jadi oke kalau kerja sama kita di lapangan baik gitu, Pak, tapi dalam pembahasan anggarannya hendaknya betul sungguh-sungguh gitu, pendalaman itu sungguh-sungguh gitu, Pak, karena menyangkut uang rakyat ini yang harus kita pertanggung jawabkan. Contoh di Dirjen Pendis kemarin 2020 1,5 triliun tidak terbelanjakan. Alangkah sedihnya kalau 1,5 triliun ini perencanaannya mantap itu dibangun ruangan-ruangan kelas baru untuk madrasah, untuk pondok pesantren kita. Nah ini persoalan seperti nah kita harapkan jangan terulang terus Silpa ini, karena Silpa itu suatu perencanaan yang tidak bagus, tidak matang kita, nafsu besar tenaga kurang nggak boleh, Pak, dalam birokrasi seperti itu. Jadi kami mengharapkan alokasi waktu ini betul-betul kedepan ini termasuk pembahasan anggaran.

Jadi jangan target hari ini selesai, hari ini selesai tidak begitu, karena ini sangat serius menyangkut rupiah dari rakyat. Ini kan kita dipantau semua ini. Jadi kami harapkan Pak Ketua ini betul-betul nanti ke depan ini alokasi waktu pembahasan anggarannya, betul-betul karena anggarannya cukup besar bukan sedikit triliunan sehingga nanti sasaran tepat ya kan, pengawasan juga tepatnya dalam rangka pengawasan kami ini, evaluasi ini kan pengawasan salah satu fungsi DPR, disamping *budget* pengawasan itu.

Yang kedua, Pak, mengenai masalah pondok pesantren dengan keluarnya Perpres Nomor 19 21, Pak, ya kan? Nah ini tentu nanti menjadi pertanyaan kalau kami reses Oktober ini, tadi kan Bapak sepintas saja menyampaikan. Jadi kami mohon jugalah penjelasannya apa betul si dana abadi pondok pesantren itu apa betul gitu? Sehingga kita juga terang benderang menyampaikan ke pondok pesantren itu sehingga mereka dapat gambaran oh kehidupan kedepan ini pondok pesantren akan cerah, kemudian ada kerja samanya pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi wajib mereka menganggarkan dana abadi pondok pesantren yang kemarin itu asalnya karena vertikal. Jadi vertikal tidak bisa apa-apa Bupati, Gubernur, tapi dengan adanya Perpres sebagai turunan dari Undang-Undang 18 19 itu bisa sinergi. Jadi kami meminta juga penjelasan dari Pak Dirjen Pendis seperti apa betul

nanti masalah dana abadi ini, sehingga dana abadi ini merupakan suasana yang terang benderanglah bagi kehidupan kita apa namanya pondok pesantren kita.

Terakhir, Pak, di dalam satuan menyebut anggaran ini, Pak, ini di dalam Dirjen sama bahwa Sekjen seperti tabel IV itu realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja. Sementara di Dirjen Pendis menyebutkan disini Pagu Anggaran berdasarkan jenis pengeluaran, ini tertib administrasi keuangan, Pak. Apa si bedanya antara administrasi anggaran berdasarkan jenis belanja dengan anggaran berdasarkan jenis pengeluaran? Nah ini tertib administrasi, Pak. Jadi ini tolong mana yang diikuti secara keuangan ini tabel IV Dirjen Pendis, tabel IV Dirjen Bimas. Jadi ini Pak Sekjen tolong ini jangan nomenklatur itu dirubah-rubah, Pak, karena pemahamannya akan beda nanti. Jadi kalau nomenklturnya yang tabel IV Dirjen Pendis itu standarnya itu atau di Dirjen Bimas jenis belanja kalau itu tabel.

Jadi itu saja Pak Ketua catatan-catatan, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi masukan dan tidak dianggap angin lalu, tapi ini menjadi perhatian bersama demi kebaikan antara eksekutif dengan legislatif, karena ini menyangkut prinsip-prinsip anggaran dan prinsip-prinsip tentang belanja untuk masyarakat kita. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Dr. Achmad mantan Bupati dua periode. Selanjutnya dari PKS Ibu, silakan Ibu Nur Azizah Tamhid.

F- PKS (Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.):

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Barangkali untuk agar agak santai saya mau menyampaikan beberapa ayat Al-Quran. Memang orang hidup harus saling taushiyah dengan kebaikan dan kesabaran.

Wal'asr innal insaana lafi khusr lla lal lazina aamanu wa'amilus saali haati wa tawa saw bil haqqi wa tawa saw bis sabr.

Selanjutnya dalam Surat At-Taubah ayat 71 Allah berfirman:

Wal-mu'minuna wal-mu'minatu ba'dhum auliya u ba'd, ya muruna bil-ma'rufi wa yan-hauna 'anil-mungkari wa yuqimunas-salata wa yu tunaz-zakata wa yuti unallaha wa rasulah ula ika sayar hamuhumullahh innallaha azizzun hakim

Dan di Surat Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman:

Yaaa ayyuhal laziina aamanud khulus fis silmi kaaffatanw wa laa tattabi'uu khutuwaatish shaitaan, innahu lakum aduwum mubiin, sadaqallah hul aziim.

Kaitannya ini karena Kementerian Agama itu menjadi soko guru agama seluruh rakyat Indonesia. Ini yang memang apa, Komisi VIII Komisi dunia akhirat. Nah yang terjadi ada beberapa media yang apa namanya menyampaikan pelanggaran-pelanggaran di masyarakat termasuk kebebasan beragama berkeyakinan nah yang ini sebetulnya sangat menggelisahkan, yang saya kuatir itu berimbas pada pendangkalan akidah.

Nah ini kewajiban Kemenag, nah jelas kesana sehingga kaitan hal ini maaf kalau tadi ya termasuk agenda bimas Islam, penyuluhan-penyuluhan agama apa pun juga ada bimas-bimasnya. Nah ini tolong tadi sudah disampaikan si oleh sebagian teman-teman gitu kan, nah ini mudah-mudahan ini dilaksanakan secara serius, sehingga jangan sampai terjadi penangkal pendangkalan akidah. Kalau akidah dangkal kemudian *murtad naudzubillah* kasihan. Kita yang seharusnya memang mengantarkan rakyat Indonesia itu selamat bahagia dunia akhirat, itu kesana. Sehingga dalam kaitan penyuluh agama kemudian KUA yang revitalisasi KUA ini menjadi point penting dari Pak Menteri Agama sendiri. Jadi ada perbaikan infrastruktur, perluasan cakupan layanan KUA, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM KUA.

Nah ini mudah-mudahan selalu mendapatkan pemantauan dan juga bimbingan dari Bimas Islam tentunya supaya bagaimana mengantarkan masyarakat Indonesia itu memiliki akidah yang kokoh, itu luar biasa. Kalau Rasulullah saja menyampaikan man artinya begini mayahdil aduh lupa, barang siapa yang seseorang itu mendapat hidayah perantaraan kamu, maka bagimu memiliki kebaikan yang lebih dari pada dunia yang disinari matahari, *La an yahdialloh bika rojulan wahidan khoirun laka mim maktolaa alaihi syam*, luar biasa ini hadist *Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam*.

Oleh karena itu mari kita bersama-sama memang menjaga akidah-akidah yang sudah ada. Kemudian karena ini juga kalau di Indonesia memang sudah ada Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam pada Ketuhanan Yang Maha Esa itu jelas bahwa orang Indonesia itu harus menjalankan perintah dan larangan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagai bangsa yang religius. Kemudian dalam Undang-Undang 45 sudah jelas di ayat (29) itu Inysa Allah sudah hafal semua kita.

Yang selanjutnya, yang keberapa ya yang ketiga jadi mudah-mudahan kalau selama ini yang tergambar madrasah-madrasah swasta ini kurang dapat perhatian mudah-mudahan sisa tiga bulan ini dengan anggaran yang ada bisa dioptimalkan untuk peningkatan kualitas dan kemampuan kapasitas semuanya di madrasah-madrasah swasta.

Ada tiga hal kemudian yang terakhir, pada kesempatan ini Pak Dr. KH. Surahman Hidayat menghadihkan buku yang berjudul Harmoni Muslim Non

Muslim Dalam Bingkai Syariah. Ini dibagikan untuk Anggota Komisi VIII dan juga Bapak-Bapak dari Kemenag, yang semua buku ini ada di Setkom VIII Insya Allah seperti itu. Sampai disini kurang lebihnya mohon maaf.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Ibu Ustadzah Nur Azizah Tahmid dari PKS.Selanjutnya dari PAN Pak Rizal, silakan Pak Rizal.

F-PAN (H. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dari tadi penjelasan dari Bapak Dirjen, Pak Sekjen seluruh anggarannya dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan saya menghitung rata-rata antara 60 sampai 65% semua kegiatan yang ada. Dan kalau dilihat waktunya memang tinggal tiga bulan lagi, Pak, tiga bulan, bulan Oktober, November, dan Desember, Desember sudah terakhir, terakhir. Ini cukup menurut saya menurut cukup kritis untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang, yang sudah direncanakan. Hanya saya mengusulkan supaya ini lebih, lebih terkordinasi lagi, Pak, antar Pak Dirjen-Dirjen dengan bawahannya, kalau tidak memang bisa saja terjadi kembali seperti tahun 2020 yang tersisa anggaran 1 triliun lebih yang berdasarkan laporan dari Pak Menteri yang lalu.

Oleh karena itu, saya menyarankan supaya ini dicek ulang, saya pernah di birokrasi juga, Pak, jadi kalau, kalau kita lihat kira-kira yang mana yang tidak bisa terserap harus segera dilakukan revisi. Kalau tidak dilakukan revisi sayang ini anggaran ini yang sudah disiapkan untuk Kementerian Agama. Nah bagaimana cara merevisinya, mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang lebih mudah dilakukan dan mudah dipertanggung jawabkan dan ini tergantung kepada Pak Dirjen masing-masing kalau tidak dikontrol di bawah mungkin akan lewat terus, Pak, akan lewat terus.

Nah bagaimana yang mudah, itu saya kira Pak Dirjen dan Pak Sekjen yang lebih tahu, kira-kira anggaran mana yang bisa dilakukan dengan cepat. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Achmad kalau berdasarkan lelang walaupun sekarang ada lelang cepat satu bulan bisa selesai, tapi kalau berdasarkan proyek-proyek itu agak sulit. Jadi saya kira ini mungkin harus di ditekankan oleh Pak Sekjen, Pak Dirjen supaya melakukan revisi sehingga tidak tersisa lagi anggaran seperti tahun 2020 yang lalu.

Saya lihat memang ada beberapa misalnya, saya sudah merasakan, Pak, yang kemarin saja marot saya sudah melaksanakan tiga kali, itu bagus sekali untuk menjelaskan kepada masyarakat masalah-masalah tidak berangkatnya haji dan umroh yang ada. Jadi pada waktu itu diundang misalnya tokoh-tokoh DKM, ustadz, kiyai-kiyai dan mereka sebagai penyambung lidah dari masyarakat sehingga masyarakat bisa, bisa tahu persis permasalahan yang terjadi. Banyak berita-berita hoaks misalnya itu sangat, sangat bagus saya kira yang itu mengkomunikasikan antara Pemerintah dengan masyarakat itu bisa dijalankan. Saya *alhamdulillah* sudah tiga kali Pak Ketua melaksanakan dan mungkin minggu depan yang keempat kali, responnya sangat bagus.

Nah kemudian banyak program-program yang menurut saya memang harus di dikordinasikan, Pak, misalnya bantuan-bantuan kepada pondok pesantren, yang memang mungkin akan mempersulit karena harus meng-*upload* semua persyaratan-persyaratan yang ada. Persyaratan kita misalnya sudah masuk semua tetapi proses *assessment* dari Kemenag belum juga berjalan, nah kesulitannya dimana kira-kira, apakah memang staf Bapak yang kurang atau kah bagaimana karena mereka menunggu juga? Jangan-jangan ini janji, janji, janji anggota yang nggak bener gitu omong kosong katanya, karena mereka selalu mempertanyakan kepada kita yang ada beberapa bantuan yang Bapak berikan. Nah oleh karena itu kami juga minta supaya kalau ini segera di *assessment* misalnya ini mempercepat realisasi anggaran yang ada di Kementerian.

Nah kemudian mengenai dana abadi umat, Pak, saya ingin tahu kira-kira ini pasti ditanya oleh masyarakat, mohon dijelaskan dana dari mana ini kira-kira, apakah kita mengambil dari dana seperti misalnya dana haji sekarang dikelola oleh BPKH itu sudah aman, tapi dana abadi umat untuk pondok pesantren ini dari mana kira-kira, bagaimana pengelolaannya, kemudian Lembaga apa yang nanti akan melakukan pengelolaan terhadap dana ini gitu? Nah saya kira itu, Pak, dari saya untuk beberapa pertanyaan tadi sudah banyak dijelaskan oleh yang lain. Terima kasih Pak Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Pak Rizal terima kasih, Dapilnya Dapil Banten III, Pak. Dari Anggota cukup yang hadir ya secara fisik atau Pak Ali ada yang mau disampaikan? Cukup oke. Jadi

Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati.

Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Sekjen atau Bapak-Bapak Dirjen atau Kepala Badan yang tadi sempat disebut-sebut oleh para Anggota

untuk memberikan tanggapan. Pak Sekjen ada yang mau ditanggapi atau Pak Dirjen. Silakan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA (NIZAR ALI):

Baik terima kasih. Yang pertama tentu saya ucapkan terima kasih atas masukan, kemudian saran, dan lain sebagainya yang disampaikan oleh para Anggota, tentu kami akan jadikan bahan untuk perbaikan berikutnya itu Pak Rudi ya dan evaluasi kamilah untuk meningkatkan kordinasi.

Terkait dengan penyerapan memang tadi sudah kami sampaikan ini terkendala pada aspek *refocusing*, sehingga menunggu dan beberapa sudah baru *clear* itu sekitar bulan Agustus sehingga kemungkinan ini baru bisa kita lakukan percepatan dan kita punya pengalaman bahkan lebih parah lagi itu bisa menyerap banyak dan kita sebenarnya secara umum sejak 2018 sampai 2020 itu kita penyerapan terbaik nomor 3 seluruh Kementerian yang punya besar itu Pak Rizal ya dan saya rasa nanti secara anu kami persilakan Pak Dirjen yang terkait untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mohon singkat tapi bisa menggambarkan apa, menjawab pertanyaan. Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Sekjen. Silakan Pak Dirjen Pendis.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA:

Iya terima kasih. Terima kasih atas motivasi dari seluruh Anggota Dewan yang terhormat yang meminta agar kita sesama bersama melakukan kegiatan akseleratif dan lebih *progresif* menyapa rakyat agar kehadiran kita sebagai aksekutif dan legislatif dapat dirasakan oleh masyarakat.

Mencoba menyikapi pandangan Bu Endang tentang akreditasi, sebetulnya di beberapa unit satker kita telah membangun unit khusus untuk mengelola penjaminan mutu ini, Bu, akreditasi. Jadi akreditasi ini tidak sekedar mandatori yang dipegang oleh program study tetapi dibantu oleh lembaga-lembaga yang memang berdedikasi khusus untuk itu.

Dan terakhir ini untuk perguruan tinggi proses akreditasi tidak harus dilakukan setiap lima tahun tetapi cukup mengajukan kembali dan memperoleh nilai dan Insya Allah kegiatan-kegiatan administrasi kita coba kurangi sedemikian rupa sehingga fokus terhadap proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik.

Kemudian tentang penyelenggaraan PAI di pendidikan agama Islam di sekolah yang dirasakan kurang dan salah satu metigasi yang kami tawarkan untuk solusi bagi bangsa ini adalah kehadiran sekolah agama, madrasah adiniyah, sekolah arab atau sekolah siang atau apa pun istilahnya yang pada

dasarnya kami juga ingin menyapa menghadirkan sebuah didikan agama yang lebih komprehensif. Tentu dalam pemahaman kita bersama dua jam di sekolah itu tidak cukup, tapi *alhamdulillah* di madrasah kita punya 6 pelajaran mata pelajaran yang menjadi fundamen dan pondasi seseorang agar dia dalam penyelenggaraan pendidikannya wajib 6 mata pelajaran ini.

Kemudian dari Pak Rudi Hartono, terima kasih atas motivasinya dan mudah-mudahan kita bersama dapat mengayuh langkah bersama mengarungi kehidupan kita dan berkolaborasi bersinergi. Sepanjang yang saya tahu Pak Rudi kalau WA ke saya selalu dibalas walaupun mohon maaf kalau sedikit terlambat. Nah kemudian Pak Huda dan termasuk juga mencoba menangkap dari Pak Rizal dari PAN dan PKB tentang Perpres 82 2021 Dana Abadi Pesantren. Jadi yang baru dimasukan di dalam Perpres ini adalah sumber dana abadi yang diintegrasikan dengan dana LPDP itu saja yang saya tahu. Bahwa pesantren boleh memperoleh sumbangan dari Pemerintah Daerah, dari organisasi profit oriented dalam bentuk CSR, kemudian hibah luar negeri itu di data dan disusun sedemikian rupa, tetapi khusus dana abadinya itu itu terintegrasi dengan LPDP dan sasarannya lebih pada investasi sumber daya manusia. Jadi hal-hal yang lain saya kira nanti mungkin diturunkan kedalam PMA-PMA yang mudah-mudahan mampu memenuhi keinginan kita bersama. Untuk Pak Achmad juga sama tadi pernyataan tentang PM apa namanya Perpres 82 2021.

Khusus untuk belanja modal sekedar informasi saja bahwa belanja modal di pendis itu memang masih 40,49% karena memang biasanya pembayaran dilakukan pada akhir tahun setelah kontrak selesai. Jadi kontrak selesai dia langsung 90% itu, Pak, jadi ini baru dana semacam dana apa namanya termin satu dan seterusnya atau dana awal. Saya kira demikian dari pendis. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Sekjen ke Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Dirjen. Dari Pak Dirjen Bimas Islam jika ada yang perlu ditanggapi silakan, Pak.

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM (Prof. KAMARUDIN AMIN):

Terima kasih. Ada satu point yang saya ingin sedikit memberi penjelasan ya terkait dengan keluarga sakinah yang disampaikan oleh Bu Endang tadi. Jadi memang program keluarga sakinah ini adalah program prioritas Gus Menteri juga, salah satu program unggulan kita juga mengingat sekarang ini kalau kita sama-sama sering mungkin mendapatkan informasi bahwa angka perceraian di Indonesia memang masih sangat tinggi sekali, dari dua juta peristiwa nikah setiap tahun perceraianya itu hampir sekitar 18-19% ya, jadi hampir sekitar 350 ribuan *which is* tentu sangat tinggi sekali. Dan tentu disini membutuhkan bimbingan dari calon-calon keluarga kita gitu anak-anak kita, sehingga kami terus melakukan pembinaan secara masif dan juga

intensif meskipun memang kami jujur mengakui bahwa dari dua juta peristiwa nikah yang terjadi setiap tahun belum sepenuhnya bisa kita bimbing ya. Sehingga sekarang kita mencari solusi kita membuat program *hybrid* dan juga kami membuat modul-modulnya yang bisa diakses secara daring melalui website yang kami sudah laksana, yang kami sudah buat.

Jadi calon-calon pengantin yang tidak sempat mendapatkan bimbingan langsung itu, bisa mengakses lewat website yang sudah kita buat dan disitu sudah lengkap sekali modul-modulnya, termasuk di dalamnya terkait dengan penanganan stunting dan lain-lain.

Kemudian tentang moderasi beragama dan majelis ta'lim memang ini kita membina majelis ta'lim itu sebenarnya ratusan ribu majelis ta'lim dibawah binaan Kementerian Agama, karena setiap penyuluh kita itu membina ya kalau yang PNS bisa sampai sepuluh majelis ta'lim rutin binaannya, kemudian yang non PNS tiga sampai empat jadi jumlahnya cukup besar sekali. Nah tantangan kita memang adalah bagaimana penyuluh kita ini bisa memberikan penyuluhan yang bermutu berkualitas sehingga tantangan kami adalah memberikan peningkatan kapasitas kepada penyuluh, agar mereka memiliki pemahaman yang berkualitas bermutu luas dalam sesuai dengan paham keagamaan yang benar. Tentunya dan ini tantangan kita dan oleh karena itu komitmen kami juga Insya Allah kami akan juga mengajak Anggota Komisi VIII yang terhormat untuk nanti bersama-sama di Dapil masing-masing kita bisa menyapa penyuluh-penyuluh kita untuk kita sama-sama memberikan pengarahan kepada mereka. Saya kira dari Bimas Islam itu yang sempat saya catat tadi. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam

Terima kasih Pak Dirjen Bimas Islam.

Selanjutnya bimas Kristen kalau ada yang perlu ditanggapi silakan.

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN (Prof. THOMAS PENTURY):

Terima kasih Pak Pimpinan Komisi VIII Pak Ace. Saya pertama ingin menyampaikan terima kasih untuk dukungan dari teman-teman terutama tadi Pak Rudi Hartono dalam kesempatan menyampaikan pandangan itu ada kaitan dengan ke Kristenan. Kami ingin menyampaikan bahwa memang tugas fungsi kami adalah pembinaan kepada umat dan kami berusaha untuk memaksimalkan semua tugas itu dengan baik.

Kami mohon maaf kalau memang ada kordinasi yang belum berjalan dengan baik seperti yang disampaikan Pak Rudi ya, Pak, bahwa mungkin ada komunikasi yang *miss* dengan kami tapi sepengetahuan kami semua yang

biasanya berkomunikasi kami respon dengan baik Pak Rudi. Jadi mohon maaf kalau memang ada, ada hal yang tidak bisa kemudian terlaksana karena komunikasi yang mis itu. Terima kasih untuk motivasi dan dukungan terutama dari teman-teman di Fraksi Nasdem Pak Rudi dan teman-teman juga yang senantiasa memperhatikan umat terutama umat Kristen dalam tugas-tugas fungsi dari Anggota DPR.

Demikian Pak Ace dari saya.

KETUA RAPAT:

Iya selanjutnya para Dirjen yang tadi sempat ada yang dimension oleh, Pak Dirjen Aji silakan.

Pt. DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH (KHOIRIZI):

Baik izin, terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi VIII. Saya ingin sedikit apa menjelaskan pertanyaan Bunda Endang. Terima kasih, Bu, terutama dengan semua Komisi VIII sinergi kita sudah berjalan *alhamdulillah* Insha Allah terus meningkat sinerginya, sehingga bisa mendapatkan masukan-masukan yang bisa dijadikan acuan di dalam kita membuat regulasi ke depan.

Yang pertama, memang kami menyadari *progres* realisasi SBSN agak terlambat akibat dari pandemi sehingga memperlambat proses pelelangan seterusnya. Yang kedua, dalam waktu yang ini sudah mulai masuk musim hujan ini juga menjadi kendala tetapi kami terus melakukan *sport* terus melakukan *monitoring*, untuk bagaimana seluruh proyek SBSN ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Hasil tinjauan kami ke lapangan dari hasil fisik memang lebih besar dari serapan anggaran karena memang seluruh konsultan pelaksana mengkosentrasi agar bagaimana proses pembangunan ini segera cepat dilaksanakan, sehingga tepat waktu yang sudah kita janjikan.

Yang kedua tentang PNBP, memang PNBP ini kita harapkan cukup besar 34 miliar tapi realisasinya sampai hari ini baru 3 miliar. Ini tentu semata-mata sekali lagi akibat pandemi sehingga seluruh UPT kita tidak bisa melaksanakan programnya akibat tidak adanya orang yang menyewa asrama haji, tapi kita bersyukur karena tidak dipakainya asrama haji berkat kesediaan fisik bangunan kita, kita bisa hibahkan untuk sementara membantu penyelenggaraan Covid 2021. Sehingga kami harus melakukan revisi target anggaran itu dalam waktu yang sangat singkat, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kita semua. Sekali lagi segala dukungan evaluasi dan masukan-masukannya menjadi perhatian kami untuk menjadi acuan di dalam kami melakukan program-program ke depan. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam

Terima kasih Pak Dirjen PHU. Jika ada dari Pak Kaban cukup? Cukup oke.

Bapak/Ibu sekalian,

Kita langsung kepada kesimpulan dan kita telah menyiapkan kesimpulan dari rapat ini nanti bisa dicermati secara seksama.

**DRAFT KESIMPULAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VIII DPR RI
DENGAN
PEJABAT ESELON I KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2021-2022,
SENIN 27 SEPTEMBER 2021.**

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan pejabat Eselon I Kementerian Agama Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Jenderal Bimas Kristen, Direktur Jenderal Bimas Katolik, Direktur Jenderal Bimas Hindu, Direktur Jenderal Bimas Budha, Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Inspektorat Jenderal, Kepala Badan Litbang dan Diklat, dan Plt. Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, membahas evaluasi program dan anggaran tahun 2021 dan isu-isu aktual disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Republik Indonesia tahun 2021 pada unit Eselon I Kementerian Agama Republik Indonesia sampai dengan bulan September 2021, saya kira perlu disebutkan saja tanggalnya. Iya tanggal 27 2021 sebagai berikut:
 - Sekretariat Jenderal anggaran tahun 2021 Rp2.170.089.746.000,- realisasi Rp1.489.911.670.480,- atau sebesar 68,66%,
 - Dirjen Pendidikan Islam Rp54.492.247.880.000,- realisasi Rp37.579.112.364.784,- atau sebesar 68,96%,
 - Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam sebesar Rp5.414.368.428.000,- terserap realisasi Rp3.564.776.432.023,- atau terserap 65,84%,
 - Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen anggaran sebesar Rp1.818.283.496.000,- terserap realisasi sebesar Rp1.152.771.515.042,- atau 63,40%,
 - Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik Rp868.732.804.000,- terserap Rp,549.156.099.000,- atau terserap 63,21%,
 - Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu 757.919.098.000,- terserap Rp505.378.073.507,- atau sebesar 66,68%,

- Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha Rp253.512.205.000,- terserap Rp174.276.901.758,- terserap 68,7%,
 - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh anggaran Rp1.386.453.782.000,- terserap Rp660.434.713.627,- terserap 47,63%,
 - Inspektorat Jenderal Rp152.061.469.000,- terserap Rp100.357.232.083,- atau 66,00%,
 - Badan Penelitian, Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan anggaran Rp600.993.526.000,- terserap Rp385.571.273.593,- atau terserap 63,73%, dan
 - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal anggaran Rp83.164.935.000, terserap Rp28.940.021.000,- atau baru terserap 34,80%,
 - Selanjutnya Komisi VIII DPR RI meminta kepada para pejabat Eselon I Kementerian Agama Republik Indonesia untuk meningkatkan serapan anggaran di setiap satuan kerja terutama dalam pencapaian program prioritas yang telah direncanakan,
2. Komisi VIII DPR RI meminta para pejabat Eselon I Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
- a. Mengalokasikan anggaran untuk pemberian bantuan rehabilitasi sarana parasarana pendidikan keagamaan dan tempat ibadah yang terdampak bencana alam,
 - b. Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu, sehingga penyelesaiannya sesuai dengan tenggat waktu yang direncanakan,
 - c. Mengoptimalkan kordinasi dengan Kementerian atau Lembaga dalam pelaksanaan Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan dan Penyelenggaraan Pesantren, khususnya mengenai implementasi dana abadi pesantren agar dapat dijalankan sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan pesantren,

Dari para Anggota ada tambahan?

ANGGOTA DPR RI:

Cukup.

KETUA RAPAT:

Cukup, dari pejabat Eselon I ?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA (NIZAR ALI):

Ada satu mungkin yang 2 C itu.

KETUA RAPAT:

2 C ya silakan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA (NIZAR ALI):

2 c itu mungkin dijadikan nomor tiga karena ini hanya leading sektornya itu Pendis, karena nggak mungkin Eselon I lainnya mengkoordinasi tentang dana abadi pesantren, 2, 2d. Jadi apa Komisi VIII meminta pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pendis untuk ini mengoptimalkan koordinasi dan seterusnya, gitu Pak Ace.

KETUA RAPAT:

Oke. Karena ini dua ini ya dua sektor. Pak, Pak Thomas silakan.

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN (Prof. THOMAS PENTURY):

Jangan pakai a gitu maksudnya.

KETUA RAPAT:

Oh diubah saja oke, ada lain?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA (NIZAR ALI):

Cukup, Pak.

PESERTA RAPAT:

itu Pak tenggang tanggal-tanggal apa tenggang-tenggang waktu?

KETUA RAPAT:

Tenggat, tenggat waktu, betul kan?

PESERTA RAPAT:

Baik.

KETUA RAPAT:

Bapak/Ibu sekalian,

Terima kasih atas kehadirannya di dalam rapat Komisi VIII dalam rangka rapat dengar pendapat yang dilakukan dengan pejabat Eselon I Kementerian Agama. Sebelum ditutup saya persilakan kepada pejabat Eselon I yang diwakili oleh Sekjen untuk menyampaikan *closing statement*.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA (NIZAR ALI):

Baik.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang berbahagia.
Teman-teman Eselon I Kementerian Agama.

Tentu kami atas nama teman-teman semuanya, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas masukan, arahan, bimbingan sehingga rapat kali ini bisa berjalan dengan lancar dan kami tentu menindak lanjuti apa yang menjadi amanat dari hasil rapat pada sore hari ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Sekjen.

Hadirin yang kami hormati.

Demikian berakhirlah sudah rapat hari ini, terima kasih kami sampaikan kepada para pejabat Eselon I Kementerian Agama Republik Indonesia, kepada Pak Prof. Nizar, Pak Prof. Muhammad Ali Ramdani, Prof. Kamarudin Amin, Pak Thomas, Pak Yohanes, Pak Trihandoko, Pak Caliadi, Pak Khoirizi, Pak Deni, Pak Prof. Gunaryo dan Pak Mastuki atas kehadirannya dan telah menyampaikan presentasi tentang program serta anggaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dan tentu kami berharap bahwa masukan-masukan serta pandangan-pandangan yang telah disampaikan oleh para Anggota itu dapat segera ditindaklanjuti, sehingga penyerapan anggaran sesuai dengan apa yang diharapkan dan tentu apa yang dilakukan oleh kami semata-mata untuk meningkatkan kinerja dari Kementerian Agama sebagai salah satu Kementerian yang mendapatkan anggaran lima besar di Kementerian yang ada di Indonesia ini.

Untuk itu sebagai mitra Komisi VIII kami juga merasa bertanggung jawab untuk dapat mengawasi proses pelaksanaan penyelenggaraan bantuan anggaran tersebut, anggaran tersebut sehingga tentu bisa berjalan secara efektif bagi peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas kehidupan keagamaan di Indonesia.

Demikian acara ini kami tutup dan dengan membaca hamdalah *alhamdulillahirobil alamin* acara ini ditutup.

*Wallahul Muafiq Ila Aqwamith Thariq.
Wabillahi taufik walhidayah
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

(RAPAT DITUTUP PUKUL:14.53 WIB)

**Jakarta, 27 September 2021
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
NIP. 197309261997031001**